

RESTORASI MEIJI LATAR BELAKANG DAN KEBERHASILANNYA

SKRIPSI



Oleh :

B.A. RIANA UTAMI PRAPTININGSIH

NIM : 89 214 096

NIRM : 890052010604120082

**JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
1996**

RESTORASI MEIJI LATAR BELAKANG DAN KEBERHASILANNYA

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan Program Studi Pendidikan
Sejarah Jurusan Pendidikan Ilmu
Pengetahuan Sosial**

Oleh :

B.A. RIANA UTAMI PRAPTININGSIH

NIM : 89 214 096

NIRM : 890052010604120082

**JURUSAN PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SANATA DHARMA
YOGYAKARTA
1996**

SKRIPSI
RESTORASI MEIJI
LATAR BELAKANG DAN KEBERHASILANNYA

Oleh :

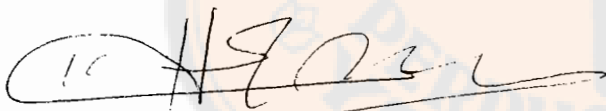
B.A. RIANA UTAMI PRAPTININGSIH

NIM : 89 214 096

NIRM : 890052010604120082

Telah Disetujui Oleh :

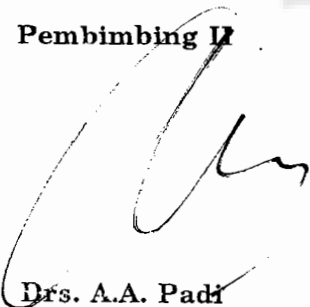
Pembimbing I



Dr. P.J. Suwarno, SH.

Tanggal

Pembimbing II



Drs. A.A. Padi

Tanggal

RESTORASI MEIJI LATAR BELAKANG DAN KEBERHASILANNYA

SKRIPSI

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

B.A. RIANA UTAMI PRAPTININGSIH

NIM : 89 214 096

NIRM : 890052010604120082

Telah dipertahankan didepan Panitia Penguji
pada tanggal 15 Agustus 1996
dan dinyatakan telah memenuhi syarat

SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua : Drs. J. Markiswo
Sekretaris : Drs. A.K. Wiharyanto
Anggota : 1. Dr. P.J. Suwarno, S.H.

2. Drs. A.A. Padi

3. Drs. A.K. Wiharyanto

Yogyakarta,

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta

Dekan,


(Dr. A. Priyono Marwan, S.J.)

K A T A P E N G A N T A R

Puji syukur pada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberkati penulisan skripsi ini hingga dapat diselesaikan. Salah satu tujuan penulisan ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Program Studi Pendidikan Sejarah - Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.

Penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Drs. J. Markiswo, selaku ketua jurusan pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial.
2. Bapak Drs. A.K. Wiharyanto, selaku kepala program studi dan dosen pembimbing akademik yang banyak memotivasi untuk segera menyelesaikan penulisan ini.
3. Bapak Dr. P.J. Suwarno, S.H., selaku dosen pembimbing I yang dengan kesabaran memberi bimbingan dari awal sampai akhir penulisan.
4. Bapak Drs. A.A. Padi, selaku dosen pembimbing II yang memberi pengarahan dan dorongan.
5. P. Mardi Santosa, S.j., Fr. Pamungkas, S.j., Fr. Sigit, S.j dan Sr. Benedicte, C.B., yang telah memberi penyegaran rohani yang sangat penting dalam menunjukkan arah dimasa krisis iman.
6. Bapak, ibu, kakak, adik - adik, teman - teman di Asrama Syantikara, di rumah Cendani 94 A, Pandawa Lima dan YSS yang setia menemani dan memberi semangat untuk

menyelesaikan penulisan ini.

Akhir kata, semoga penulisan ini bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan pengajaran sejarah pada khususnya. Tidak terlepas dari kekurangan, penulisan ini belum dapat dikatakan sempurna. Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk menyempurnakannya.

Yogyakarta, April 1996

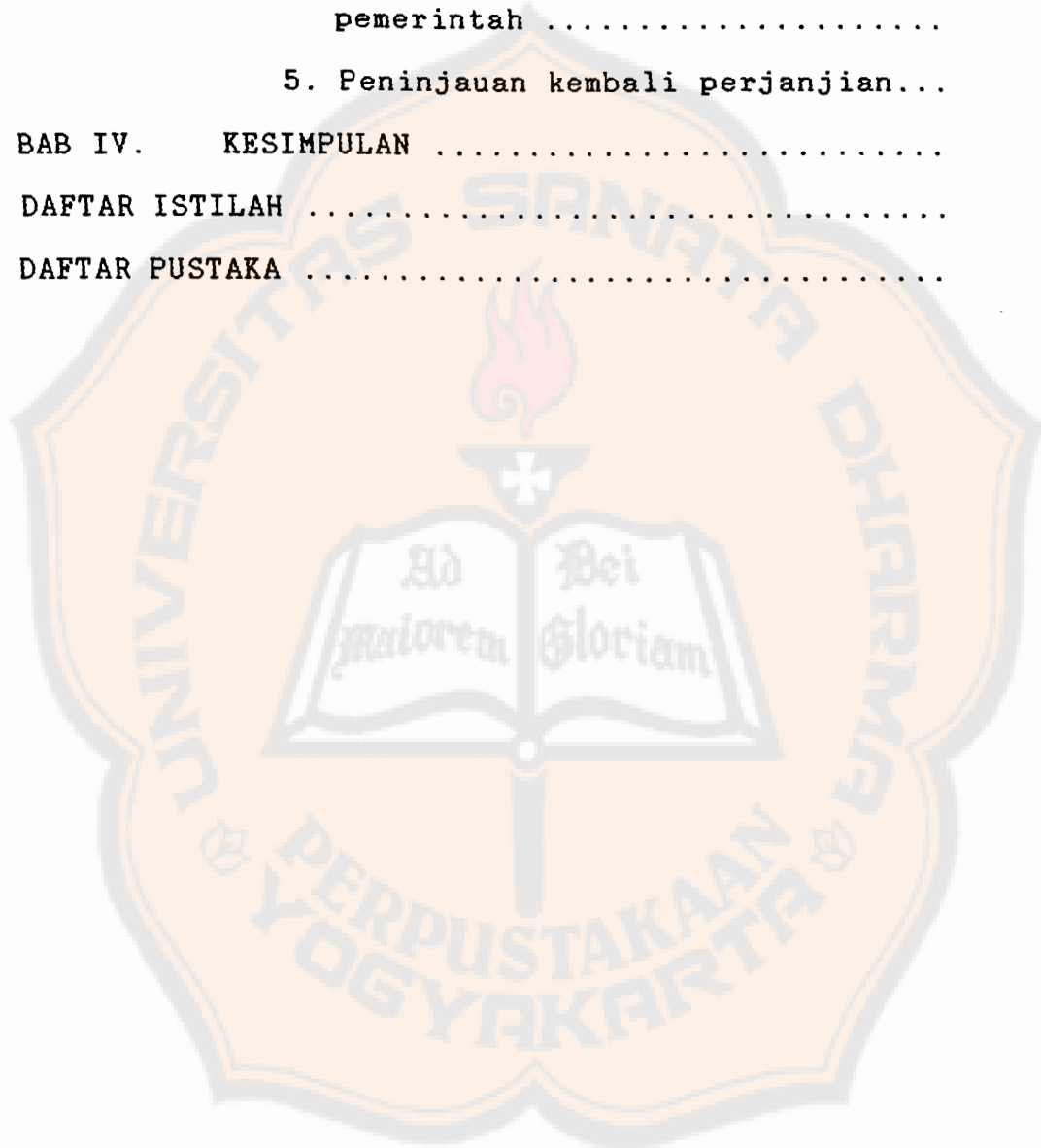
Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Tujuan Penulisan	6
D. Manfaat Penulisan	6
E. Landasan Teori	7
F. Hipotesa	15
G. Metode Penulisan	16
BAB II. LATAR BELAKANG RESTORASI MEIJI	18
A. Pembukaan Jepang	18
B. Dampak - dampak Pembukaan Jepang ..	26
1. Bidang sosial-budaya.....	26
2. Bidang ekonomi.....	29
3. Bidang politik.....	32
BAB III. LATAR BELAKANG KEBERHASILAN PEMBAHARUAN MEIJI	44
A. Tokoh - Tokoh Pembaharuan Meiji ...	44
B. Pelaksanaan Kebijakan.....	51



1. Kebijakan politik.....	52
2. Kebijakan ekonomi.....	61
3. Kebijakan sosial-budaya.....	67
4. Reaksi terhadap kebijakan pemerintah	70
5. Peninjauan kembali perjanjian...	77
BAB IV. KESIMPULAN	80
DAFTAR ISTILAH	86
DAFTAR PUSTAKA	88



A B S T R A K

RESTORASI MEIJI
Latar Belakang dan Keberhasilannya

Riana Utami Praptiningsih
Universitas Sanata Dharma
Yogyakarta

Penulis memilih judul Restorasi Meiji : Latar belakang dan keberhasilannya karena tertarik akan peristiwa pemindahan kekuasaan yang dilakukan sendiri oleh shogun. Ini mengesan karena sangat jarang terjadi bahwa seseorang yang telah duduk menjadi penguasa dengan mudah menyerahkan kekuasaannya pada pihak lain. Selain itu, penulis juga tertarik akan keberhasilan pemerintahan Meiji dalam, langkah - langkah lebih lanjut saat Kaisar telah kembali berkuasa. Itulah beberapa permasalahan yang ingin penulis jawab.

Permasalahan pertama membahas cara bangsa Barat terutama Amerika Serikat dalam membuka Jepang sedemikian rupa sehingga mengkondisikan Shogun untuk menyerahkan kekuasaannya. Pembahasan kedua lebih menyangkut keterlibatan tokoh-tokoh pergerakan dalam pemerintahan Meiji serta strateginya guna mencapai tujuannya. Dalam proses penyelesaian, penulis menjawab permasalahan dengan menggunakan metode penulisan yang terdiri dari studi pustaka, diskripsi dan analisa sesuai dengan kemampuan yang ada.

Dalam sejarah Jepang Restorasi Meiji merupakan peristiwa besar terutama bila dikaitkan dengan kebijakan reformasi yang melibatkan tokoh-tokoh pergerakannya. Banyak karakter yang ditampilkan baik yang ekstrim maupun yang moderat. Namun semuanya tetap mengarah pada kepentingan bangsa dan negara. Buktinya, hanya dalam kurun waktu setengah abad, Jepang telah mampu membuat dirinya sejajar dengan bangsa Barat.

ABSTRACT

**THE MEIJI RESTORATION
The Background and The Success**

Riana Utami Praptiningsih
Sanata Dharma University
Yogyakarta

This study aims to explain the main factor that sustained Meiji Restoration.

The method is descriptive and analitical.

The results show that the United State of America managed to open Japan isolation to the condition leading the shogun to submit his authority to the Emperor. The success was supported by samurai who kept pursuing the restoration's goal and who had ability to become organizer.

B A B I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tak ada satu negara pun yang melepaskan sama sekali keadaannya yang sekarang dengan masa lampainya karena proses menjadi kini adalah hasil dari masa lampainya (perjalanan sejarah perkembangannya) yang mencakup berbagai bidang kehidupan. Dalam perjalanan sejarah, negara tersebut terus berproses, mendapat banyak pengalaman baik yang menjatuhkan negara tersebut ke dalam kesulitan yang pelik maupun mengangkat negara tersebut karena keberhasilannya. Negara berproses dengan dinamikanya yang khas hingga menjadi negara kini. Sartono Kartodirdjo menyatakan, "Barang siapa lupa sama sekali akan masa lampainya, dapat diibaratkan seperti mereka yang sakit jiwa, kehilangan identitasnya."¹ Pendapat ini menunjukkan bahwa kedudukan sejarah bangsa dan negara menjadi penting bagi bangsa dan negara itu sendiri. Tidak ada perkecualian baik negara maju maupun belum maju, pendapat ini berlaku. Jawaban atas pertanyaan mengapa suatu bangsa dan negara itu menjadi keadaan yang sekarang akan dipermudah dengan cara mengetahui sejarahnya.

¹Sartono Kartodirdjo, Pendekatan Ilmu Sosial dan Metodologi Sejarah, (Jakarta : Gramedia, 1992), h.23

Bertolak dari pendapat di atas, Jepang sebagai negara maju juga memiliki sejarah. Salah satu peristiwa sejarah yang penting dalam kaitannya dengan kemajuan yang telah diraihinya adalah peristiwa Restorasi Meiji. Arti restorasi adalah pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula.²⁾ Sedangkan Meiji merupakan nama masa pemerintahan Kaisar Mutsuhito yang berarti yang berpikiran cerah.³⁾ Maka Restorasi Meiji merupakan peristiwa kembalinya kekuasaan kaisar (tenno).

Dikatakan kekuasaan kembali ke tangan kaisar karena sebelum abad VIII, kaisar pernah memegang kekuasaan pemerintahan di Jepang. Kekuasaan yang menurut kepercayaan Jepang berasal dari dewi matahari Amaterasu Omikami bersifat turun temurun. Ada pun kaisar pertamanya adalah Kaisar Jimmu, cucu dari cucu dewi matahari yang bernama Ninigi-no-mikoto. Namun, kekuasaan yang dimiliki kaisar ini berkurang setelah abad tersebut. Pada masa Heian yang dimulai pada tahun 794, motor penggerak pemerintahan adalah para penasehat kerajaan. Kemudian masa Kamakura yang merupakan masa awal kekuasaan pemerintahan oleh shogun. Kekuasaan kaisar semakin nampak dibatasi terutama pada masa Edo. Pada masa ini, pemerintahan

²Peter Salim & Yenni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta: Modern English Press, 1991), h. 1269

³Dasuki, Sejarah Jepang Jilid II, (Bandung : Balai Pendidikan Guru, 1963), h.12

shogunat Tokugawa menempatkan pejabat - pejabat yang bertugas mengawasi sekaligus mengatur hubungan antara pemerintah dengan kekaisaran. Pejabat tersebut tidak diangkat oleh kaisar melainkan Bakufu Tokugawa yang memegang kendali pemerintahan shogunat Tokugawa dari pusat. Dengan demikian, secara otomatis pertanggungjawaban dari pejabat tersebut diberikan kepada Tokugawa. Bahkan Tokugawa juga mengeluarkan undang - undang yang mengatur kehidupan istana kekaisaran. Kaisar memang tidak dihapuskan melainkan dikurangi kekuasaannya menjadi sekedar sebagai simbol dalam upacara - upacara tradisional dan keagamaan.

Jepang mengalami masa damai di bawah kekuasaan Tokugawa selama kurang lebih 200 tahun. Suasana ini tercipta berkat dukungan dari politik isolasinya yang diterapkan pada tahun 1637 sampai tahun 1854. Politik ini berhasil menjauhkan Jepang dari gangguan - gangguan yang berasal dari luar Jepang. Keadaan yang jauh dari hubungan internasional memberi peluang bagi pemerintah untuk memusatkan konsentrasinya hanya pada permasalahan dalam negeri saja, terutama masalah kestabilan kekuasaan dan negara. Politik isolasi (sakoku) merupakan benteng bagi Jepang untuk melestarikan persatuan Jepang di bawah kekuasaan Tokugawa yang memerintah Jepang dengan sistem feodalisme yang disatukan.

Isolasi tidak menyebabkan bangsa Jepang menjadi bangsa yang statis. Bangsa Jepang tetap menjadi bangsa

yang dinamis dalam suasana keterasingan dari dunia luar Jepang. Perkembangan di segala bidang tetap berjalan. Perkembangan yang sangat menguntungkan bagi Jepang dengan diterapkannya politik isolasi adalah identitas diri yang menguat dalam masyarakat Jepang seperti yang diutarakan oleh Edwin Reischauer sebagai dampak positif dari politik isolasi.

Sementara itu, perkembangan dunia tidak bisa lagi membiarkan Jepang mempertahankan politik isolasinya. Perkembangan dunia maritim dan perdagangan telah mengantarkan bangsa - bangsa Barat memasuki perairan Jepang dan membutuhkan daerah Jepang . Tokoh yang penting disebutkan dalam hal usaha meruntuhkan politik isolasi Jepang adalah Komodor Perry. Dengan kekuatan maritimnya, ia berhasil memaksa Jepang membuka diri pada tahun 1854.

Runtuhnya politik isolasi Jepang ternyata memberi dampak bagi kestabilan politik yang selama ini tercipta. Kedatangan bangsa-bangsa Barat memunculkan berbagai reaksi yang memecahkan kembali persatuan Jepang. Reaksi pro dan kontra terhadap kedatangan bangsa - bangsa Barat saling bermusuhan. Perpecahan semakin menjadi dan ramai dengan adanya berbagai kesulitan yang dihadapi masyarakat Jepang setelah sekian lama sangat jarang berhubungan dengan orang - orang asing. Perpecahan mengakibatkan ketidakstabilan nasional Jepang sejak isolasi runtuh.

Kelanjutan dari Jepang yang labil membuat Bakufu harus mengakui kekuatan dari pihak Kaisar, yang selama ini ia tekan pengaruhnya dalam gelanggang politik. Peristiwa ini ditandai dengan penyerahan kekuasaan oleh Shogun Tokugawa yang terakhir yakni Yoshimune kepada kaisar pada tahun 1868.

Sejak penyerahan ini, mulailah pembaharuan yang dipimpin oleh kaisar dan para pembantunya terutama tokoh - tokoh dari Jepang Barat. Bukan pekerjaan yang mudah untuk mengangkat bangsa Jepang sebagai bangsa yang unggul setelah dipaksa bangsa Barat untuk menghancurkan politik isolasinya. Tetapi bukti telah menjawab ketika terjadi ratifikasi perjanjian yang disetujui oleh Inggris pada tahun 1894. Keberhasilan usaha ratifikasi ini menunjukkan bahwa derajat bangsa Jepang lebih meningkat dari sebelumnya. Suatu keberhasilan yang sangat berarti bagi Jepang dalam usaha mengejar ketertinggalannya dan menunjukkan dirinya sebagai bangsa yang unggul.

B. Perumusan Masalah

Peristiwa Restorasi Meiji dan politik pembaharuannya yang berhasil mengangkat bangsa Jepang bukan merupakan peristiwa yang tidak didahului oleh gejala - gejala yang mengarah pada terjadinya peristiwa tersebut. Ada latar belakangnya. Oleh karena itu muncul beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah yang menjadi sebab terjadinya pengembalian kekuasaan ke tangan kaisar?

Permasalahan diarahkan pada faktor - faktor sosial, budaya, politik dan ekonomi Jepang sejak tahun 1853 yang melatarbelakangi terjadinya pengembalian kekuasaan ke tangan kaisar.

2. Mengapa para pelaku kebijaksanaan berhasil melaksanakan pembaharuan Meiji?

Permasalahan ini mencakup peranan yang diambil oleh para pelaku kebijaksanaan.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, dapat dilihat tujuan dari penulisan ini, yakni :

1. Untuk menjelaskan latar belakang sosial-budaya, ekonomi dan politik terjadinya pengembalian kekuasaan kaisar.
2. Untuk mengetahui letak para pelaku sebagai faktor pendukung dalam proses pelaksanaan kebijaksanaan pembaharuan.

D. Manfaat Penulisan

Hasil penulisan ini diharapkan bermanfaat bagi:

1. Penulis. Diharapkan penulisan ini dapat bermanfaat untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat - syarat mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan - Program Studi Pendidikan

Sejarah, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

2. Ilmu Pengetahuan Sosial. Hasil penulisan ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan Ilmu Pengetahuan Sosial yang lebih spesifik, khususnya tentang Jepang.

3. Pendidikan Sejarah. Diharapkan hasil penulisan ini dapat memberi tambahan informasi atau bahan pengajaran sejarah.

F. Landasan Teori

Pergeseran kekuasaan dalam arti pergantian penguasa merupakan suatu peristiwa yang biasa terjadi. Hal ini disebabkan karena adanya batasan tertentu pada manusia yang membuat manusia itu sudah tidak mampu lagi untuk berkuasa.

Sebelum berbicara tentang pergeseran kekuasaan, ada baiknya bila lebih dahulu memahami pengertian dari kekuasaan. Ada banyak definisi kekuasaan yang dinyatakan para ahli dari berbagai sudut pandang. Miriam Budiardjo di dalam bukunya yang berjudul Dasar - dasar Ilmu Politik, menjelaskan bahwa kekuasaan politik adalah kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat - akibatnya sesuai dengan tujuan - tujuan pemegang kekuasaan sendiri.⁴⁾ Tokoh lain

⁴Miriam Budiardjo, Dasar - dasar Ilmu Politik, (Jakarta : Gramedia, 1989), h. 37

yakni seorang sosiolog yang bernama Mac Iver menyatakan bahwa kekuasaan sosial adalah kemampuan mengendalikan tingkah laku orang lain baik secara langsung maupun tidak langsung dengan mempergunakan segala alat dan cara yang tersedia.⁵⁾ Definisi yang diberikan oleh Mac Iver ini hampir sama dengan Muji Sutrisno, Sj., seorang dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara yang menulis sebuah artikel di surat kabar Kompas. Ia mengartikan kekuasaan sebagai potensi untuk mengatur, merekayasa sampai mengemudikan orang lain atau massa. Muji menambahkan tidak hanya secara kognisi dikuasai tetapi simbolisasi afeksi pun dikuasai.⁶⁾ Semuanya menyebutkan kemampuan. Setiap manusia hidup mempunyai kemampuan. Kemampuan antara orang atau kelompok yang satu dengan yang lainnya berbeda. Perbedaan ini membuat pemilikan kekuasaan pada semua warga masyarakat tidak merata tergantung pada besarnya kemampuan yang dimiliki setiap warga masyarakat. Kekuasaan ini akan nampak bila ada interaksi di dalam masyarakat. Interaksi menunjukkan adanya dua pihak atau lebih. Dengan adanya interaksi akan muncul pihak yang menguasai dan yang dikuasai. Pihak yang menguasai adalah pihak yang memiliki kemampuan lebih besar daripada yang dikuasai. Pihak yang memiliki kemampuan

⁵Ibid., h. 35

⁶Muji Sutrisno, Sj., "Kuasa? (Kekuasaan)" Artikel KOMPAS, Senin 5 Februari 1996

lebih besar akan memerintah dan yang lebih kecil akan menduduki posisi sebagai yang diperintah. Dengan demikian, kekuasaan ini terdapat di mana - mana dalam hubungan sosial dan nampak sangat jelas bila hubungan yang terjadi adalah hubungan asimetris karena adanya proses pengaruh mempengaruhi yang tidak setara (timpang).

Dalam sistem politik, kekuasaan sangat penting terutama dalam kaitannya dengan pengambilan keputusan. Satu hal yang membuat kekuasaan penting adalah sifat eratnya dengan wewenang. Istilah wewenang dapat diambil dari penjelasan yang diberikan oleh Weber. Wewenang adalah suatu kemungkinan untuk membuat orang mematuhi perintah tertentu (semua perintah). Kewenangan atau authority yang sah dapat bersifat (i) rasional, yakni didasarkan atas legalitas sistem norma - norma yang formal dan pimpinan ditunjuk oleh aturan - aturan ini atas legalitas formal dan dalam kerangka aturan - aturan ini, (ii) tradisional, didasarkan atas kepercayaan yang mantap pada kesucian tradisi - tradisi yang telah berlaku sejak dahulu kala dan pada keabsahan mereka yang terpanggil untuk memegang otoritas, dan (iii) karismatis, didasarkan pada pengabdian yang luar biasa pada kesucian, kekuatan kepahlawanan atau sifat yang dapat dicontoh yang dimiliki seseorang dan kepada norma - norma yang difirmankan atau

diciptakan olehnya.⁷⁾

Pada umumnya, seorang penguasa negara tidak hanya dituntut keahliannya dalam satu bidang saja karena dalam kehidupan masyarakat negara meliputi banyak bidang kehidupan. Bila suatu saat muncul permasalahan dari satu bidang kehidupan di luar bidang yang dikuasai penguasa maka dapat terjadi kemungkinan yang lebih besar permasalahan tersebut tidak terpecahkan daripada bila permasalahan muncul dari bidang yang ia kuasai. Dampak yang terjadi selanjutnya adalah keraguan akan kemampuan penguasa atau pemimpin muncul dalam masyarakat yang dikuasainya. Apabila berkelanjutan, kedudukan penguasa atau pemimpin menjadi goyah. Atas dasar ini, perlu adanya jalinan antara penguasa dengan pihak - pihak yang lain yang memiliki berbagai keahlian dan membentuk ruling class tersendiri dalam masyarakat negara. Masyarakat sebagai pihak yang dikuasai juga dapat mempengaruhi kedudukan penguasa terutama dalam hal pengakuannya. Cara efektif untuk mendapatkan pengakuan adalah mengenal dan turut dalam jalur norma - norma yang berlaku dalam masyarakat. Pengetahuan tentang masyarakat yang dikuasai dapat menjadi modal untuk mempengaruhi masyarakat sehingga mengarah pada perolehan dukungan. Seperti telah disebutkan, tidak hanya dukungan untuk memperoleh

⁷Max Weber, "Tipe-tipe Otoritas, dalam H.G Surie, Ilmu Administrasi Negara, terj. Samekto, (Jakarta : Gramedia, 1987), h. 221

kekuasaan tetapi juga dukungan terhadap kebijaksanaan - kebijaksanaan yang diambilnya ketika telah duduk sebagai penguasa.

Untuk mempermudah pembicaraan yang membahas tentang kebijaksanaan, sebaiknya diadakan persamaan pandangan terhadap makna dari kebijaksanaan terlebih dahulu. Kebijaksanaan menurut W.I. Jenkins dipandang sebagai serangkaian keputusan berkenaan dengan pemilihan tujuan-tujuan dan cara - cara untuk mencapainya dalam situasi tertentu.⁸⁾ Pendapat ini tidak jauh berbeda dengan penjelasan Miriam tentang kebijaksanaan yang dinyatakannya sebagai kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau sekelompok orang dalam usaha memilih tujuan - tujuan dan cara - cara untuk mencapai tujuan - tujuan itu. Agar suatu kebijaksanaan dapat memberi hasil - hasil yang diharapkan, maka kebijaksanaan itu harus dilaksanakan. Pelaksanaan kebijaksanaan dapat didefinisikan sebagai penggunaan sarana-sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan-tujuan yang dipilih. Apabila terjadi keberhasilan dalam pelaksanaan, kegiatan pelaksanaan ini berarti telah memilih dan menggunakan sarana - sarana yang efektif. Kalau demikian, penganalisaan pelaksanaan kebijaksanaan sangat penting untuk memberi perhatian kepada peran dari para pelaksana kebijaksanaan dan obyek -

⁸Solichin Abdul Wahab, Analisis Kebijakan Negara, (Jakarta : Ribeka Cipta, 1990), h. 22

obyek kebijaksanaan (dalam arti orang - orang atau kelompok - kelompok terhadap siapa kebijaksanaan itu ditujukan.

Para pelaku termasuk dalam faktor yang berpengaruh di dalam proses implementasi berbagai program yang ada hingga kebijaksanaan terwujud. Dari sudut ini, kebutuhan akan satuan birokrasi yang memiliki staff yang aktif, ahli dan berdedikasi tinggi terhadap pelaksanaan tugas sangat dibutuhkan. Dengan staff yang demikian, peluang untuk mendapat dukungan yang lebih besar dari elit - elit politik yang lain akan dapat diraih. Penganalisaan terhadap para pelaku akhirnya menyangkut pada the power capabilities para pelaku yang terlibat , strategi dan konsistensinya dalam upaya mencapai tujuan - tujuan yang termaktub dalam kebijaksanaan, menciptakan serta menjamin adanya daya tanggap yang memadai guna memungkinkan keluwesan, dukungan dan umpan balik selama implementasi, sementara pada saat yang sama tetap mengusahakan adanya kontrol yang memadai atas distribusi sumber - sumber yang dipergunakan untuk mencapai tujuan - tujuan yang telah digariskan.⁹⁾ Untuk mencapai keseimbangan ini, tugas yang dibebankan pada pelaku menjadi berat karena ada banyak kemungkinan tanggapan yang tercipta justru menghambat proses implementasi.

Daya tanggap atau feedback yang telah disebutkan

⁹Ibid. h.133

menunjukkan bahwa proses implementasi mengakui adanya interaksi . Adanya aksi dari pemerintah dapat memunculkan reaksi dari masyarakat baik negatif ataupun positif. Reaksi dari masyarakat ini menjadi feedback bagi sistem politik yang dijalankan oleh pemerintah. Feedback dapat mendukung ke arah keberhasilan atau sebaliknya yakni kegagalan yang akhirnya menggoyahkan kedudukan penguasa. Kini telah menjadi jelas bahwa peran masyarakat bagi keberhasilan kebijaksanaan juga ada. Hal ini menunjukkan bahwa pengetahuan tentang masyarakat juga perlu untuk menghindari perbedaan alam pikiran antara yang berkuasa (pemerintah) dan yang dikuasai. Oleh karena itu, golongan yang berkuasa harus berusaha menanamkan kekuasaannya dengan jalan menghubungkan kepercayaan-kepercayaan dan perasaan-perasaan yang kuat dalam masyarakat yang bersangkutan yang pada dasarnya terwujud dalam nilai dan norma.¹⁰⁾ Seperti halnya masyarakat Jepang masa Tokugawa yang telah memiliki tingkat solidaritas terhadap kehidupan sosial dan kepercayaan terhadap tradisi yang sangat tinggi, seorang Jepang mengharuskan dirinya untuk melakukan tindakan sesuai dengan norma (nilai) yang berlaku. Nilai - nilai yang berlaku pada waktu itu merupakan kombinasi variabel pola partikularisme atau kolektivitas di mana seseorang

¹⁰Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, (Jakarta : CV. Rajawali, 1982), h. 264

menjadi anggota, entah itu keluarga, han atau Jepang secara keseluruhan dan nilai prestasi (performance) .¹¹) Kepemimpinan di dalam masyarakat hukum adat yang tradisional dan homogen, perlu disesuaikan dengan susunan - susunan masyarakat tersebut yang masih tegas - tegas memperlihatkan ciri - ciri *gemeinschaftlich*-nya. Di dalam masyarakat yang demikian, hubungan pribadi antara para pemimpin dengan mereka yang dipimpin sangat dihargai. Pada umumnya, pemimpin - pemimpin tersebut mendapat dukungan dari masyarakat karena tradisi atau karena sifat - sifat pribadinya yang menonjol. Dengan sendirinya, masyarakat lebih menaruh kepercayaan terhadap pemimpin tersebut beserta aturan - aturan yang dikeluarkannya. Soerjono memberi penjelasan bahwa secara sosiologis, kepemimpinan seseorang harus mempunyai sandaran - sandaran kemasyarakatan atau basis sosial. Pertama - tama, kepemimpinan erat hubungannya dengan masyarakat. Selain itu, kekuatan kepemimpinan ditentukan juga oleh suatu lapangan kehidupan masyarakat yang pada suatu saat mendapat perhatian khusus dari masyarakat, daripada lapangan kehidupan yang lain. Lapangan khusus ini disebut sebagai cultural fokus. Cultural fokus dapat berpindah - pindah. Apabila suatu saat cultural fokus

¹¹Robert N. Bellah, Religi Tokugawa, terj. Wardah dan Wiladi, (Jakarta: Gramedia dan Karti Sarana, 1992), h.18

berpindah , si pemimpin harus mampu mengalihkan titik berat kepemimpinannya pada cultural fokus yang baru.¹²⁾

G. Hipotesa

Berdasarkan landasan teori di atas maka jawaban sementara dari masalah yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Pada pertengahan abad XIX, Tokugawa menandatangani perjanjian dengan bangsa - bangsa Barat. Ia melakukan penandatanganan perjanjian tidak hanya sekali melainkan beberapa kali. Tindakan ini sangat merendahkan martabat bangsa Jepang. Selain itu, perjanjian dilakukan tanpa persetujuan dari kaisar yang dipercaya oleh bangsa Jepang sebagai penguasa tertinggi atas tanah Jepang. Tindakan ini dipandang sebagai suatu kesalahan besar dan dijadikan sebagai alat propaganda para daimyo Tozama (dari daerah luar). Kedatangan bangsa Barat ke Jepang akhirnya mampu membuat perpecahan dalam masyarakat Jepang. Akhir dari perpecahan dimenangkan oleh kelompok posisi (para pendukung kaisar).
2. Keberhasilan pembaharuan Jepang tidak bisa dilepas dari keterlibatan para pelakunya. Hal ini

¹²Soerjono Soekanto, op.cit. h. 290 - 291

disebabkan karena pelaku kebijaksanaan memainkan peranan sebagai pengambil keputusan dan pelaksana kebijaksanaan. Sebagian besar para pelaku kebijaksanaan pembaharuan setelah peristiwa kembalinya kekuasaan kaisar adalah para samurai dari Satsuma, Chooshuu, Hizen dan Tosa. Mereka yang terlibat ini berusaha memperlihatkan kemampuan mereka dalam menyeimbangkan antara pelaksanaan kebijaksanaan dan daya tanggap yang terjadi selama kebijaksanaan dilaksanakan. Mulai dari Piagam Sumpah yang disahkan oleh kaisar dan dijadikan sebagai dasar pembaharuan hingga keberhasilannya dalam meratifikasi perjanjian, para pelaku ini menunjukkan diri sebagai organisator, dinamisator dan katalisator yang berdedikasi tinggi dan berkualitas. Hal ini mengakibatkan tujuan - tujuan yang ditetapkan dapat dicapai.

H. Metode Penulisan¹³⁾

Sehubungan dengan penulisan ilmiah, maka penulisan ini menggunakan metode deskriptif analitis. Metode ini digunakan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek ataupun obyek penelitian berdasarkan fakta - fakta

¹³Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1990), h. 63

atau data - data sebagaimana adanya. Data atau fakta yang relevan yang ditampilkan kemudian dikupas implikasinya sejauh sasarannya dicapai.

Karena banyak keterbatasan terutama obyek penelitian yang jauh dan bahasa, maka penulisan ini menggunakan data - data tersier. Kegiatan pengumpulan data dilaksanakan melalui studi pustaka yakni buku - buku tentang sejarah Jepang, antara lain Premodern Japan karya Mikiso, Sedjarah Jepang karya Dasuki dan Sejarah Institusi Politik Jepang karya Ishii sebagai sumber bahan yang dipinjam dari perpustakaan. Kemudian untuk membantu pemahaman digunakan konsep-konsep dari buku - buku sosiologi dan ilmu politik. Adapun sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

Bab I, Bab Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan istilah, manfaat penulisan landasan teori, hipotesa dan metode penulisan.

Bab II, terdiri dari beberapa sub-bab tentang faktor - faktor penyebab terjadinya restorasi Meiji.

Bab III, berisi tentang para pelaku kebijaksanaan dan proses pelaksanaan sehingga pembaharuan Meiji berhasil.

Bab IV, berisi kesimpulan.

B A B II

LATAR BELAKANG RESTORASI MEIJI

A. Pembukaan Jepang

Politik isolasi Jepang yang berlangsung dari tahun 1638 dapat dikatakan kuat. Hal ini terbukti dengan kelestariannya hingga tahun 1854. Dua ratus tahun bukanlah waktu yang singkat untuk mempertahankan politik ini. Tujuan dari politik ini adalah membentengi diri dari pengaruh luar Jepang yang diperkirakan akan mengganggu perdamaian Jepang. Pengaruh luar yang dianggap berbahaya tersebut adalah pengaruh ajaran -ajaran Kristen. Semua yang berbau Kristen dihancurkan. Atas dasar ini, hubungan dengan orang - orang asing atau Barat yang umumnya beragama Kristen sangat dibatasi. Hubungan hanya terbatas dengan orang - orang Cina dan Belanda. Tempatnya pun terbatas yakni di pulau Deshima dan pengawasan ketat dilakukan terhadap tempat ini. Sementara Jepang menutup diri, dunia di luar Jepang telah mengalami perkembangan pesat dalam hal perdagangan dan dunia maritim. Perkembangan ini mendorong bangsa - bangsa Barat berlayar dan berekspansi. Kegiatan ini sampai ke perairan Jepang. Bangsa - bangsa Barat berusaha masuk ke Jepang. Rusia yang telah menaklukkan Siberia berusaha menembus politik isolasi Jepang dengan kapal dagangnya namun gagal pada tahun 1778. Pada tahun 1792 upaya ini diulang lagi dengan menggunakan kapal Ekaterina. Misi ini dipimpin oleh Adam Laxman. Misi ini tiba di Nemuro

Hokaido. Penolakan tetap diterima meski telah memenuhi permintaan dari penguasa setempat agar meminta izin dulu dengan penguasa di Nagasaki. Tahun 1804, usaha ini diulangi lagi tetapi tetap gagal, bahkan Kapten Golownin ditangkap. Inggris yang dikenal dengan penguasa lautan dan imperialis karena kebutuhan industrinya juga melakukan hal yang sama. Tetapi tetap mengalami kegagalan juga. Pada tahun 1837, Amerika Serikat tidak mau ketinggalan. Ia datang ke Edo dengan kapal Morison. Tahun 1846, Amerika mengirimkan Biddle. Kedua misi ini gagal.

Kegagalan tidak membuat bangsa Amerika jera. Amerika merasa tertantang untuk mengirimkan misinya lagi demi menunjang keinginannya membuka Jepang bagi kapal-kapalnya. Motivasi ini dilatar belakangi oleh dua sebab. Pertama - tama menyangkut letak geografisnya yang berada pada jalur dagang ke Kanton. Menurut anggapan Amerika sangat cocok untuk digunakan sebagai tempat persinggahan dan mengisi perbekalan dan bahan bakar. Kedua, mencari perlindungan bagi awak kapal Amerika yang terdampar di pantai Jepang. Misi ini dipimpin oleh Komodore Perry. Tugasnya adalah 1) meminta kepada pemerintah Jepang, jaminan dan perlindungan bagi pelaut Amerika, 2) pembukaan pelabuhan-pelabuhan Jepang supaya Amerika dapat mengisi perbekalan, air dan batubara, 3) pembukaan pelabuhan untuk berdagang.¹⁴⁾ Seluruh permintaan yang diajukan melalui surat Presiden Amerika ini harus diserahkan Perry kepada

¹⁴Dasuki, *op.cit.*, h. 6

pemerintah Jepang. Suatu tugas yang menantang mengingat gambaran kegagalan dari misi - misi sebelumnya sudah ada. Namun Perry tetap optimis. Sikap optimis ini muncul karena Perry mempunyai motivasi sendiri yang mendukung misi ini, yakni tugas ini memberi kesempatan baginya untuk menjalankan serangkaian tugas menciptakan kekuatan maritim Amerika di perairan Pasifik.¹⁵⁾ Atas dasar ini, strategi yang diambil berbeda dengan sebelumnya. Sebagai Komandan Angkatan Laut Amerika di wilayah India Timur, ia menyertakan kekuatan maritimnya. Komodor Perry tiba di Uraga dengan kapal perang berjumlah 4 buah yang berkapasitas 2400 ton dan bermuatan 16 senjata. Kemudian ia melanjutkan dan tiba di Teluk Edo pada tanggal 3 Juli 1853. Setibanya di Teluk Edo, ia menunjukkan kehebatan maritimnya. Tembakan meriam dilepaskan sebagai salam kehormatan. Tindakan ini tentu saja membuat bangsa Jepang tercengang karena selama menjalankan politik isolasinya, bangsa Jepang belum pernah melihat senjata sehebat itu. Suatu strategi yang bagus karena tindakan ini sekurang - kurangnya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Jepang bila ingin menolak lagi. Langkah awal yang sukses ini diikuti dengan langkah selanjutnya. Setelah menyampaikan surat presiden kepada pemerintah Jepang, Perry meninggalkan pesan bahwa ia akan kembali tahun depan untuk

¹⁵Paul H. Clyde, The Far East, A History of The Impact of The West on Eastern Asia, (New Jersey : Pretice Hall, 1962), h. 124

meminta jawaban atas surat permohonan tersebut.

Tenggang waktu yang diberikan Amerika yang diwakili oleh Perry kepada Jepang sangat mempengaruhi keadaan politik Jepang. Banyak usulan muncul berkaitan dengan usaha menghadapi bangsa Barat ini. Ada pihak yang mengusulkan agar ditempatkan pasukan - pasukan di pantai yang dilengkapi dengan senjata yang ditempatkan di tempat - tempat tersembunyi. Usul yang lain membiarkan orang asing itu mendarat di Jepang untuk kemudian membunuh mereka dengan tombak, oleh karena bangsa barat hanya dapat bertempur dengan baik bila menggunakan angkatan lautnya. Ada juga usul yang menganjurkan para prajurit dengan sampan mendekati kapal - kapal asing, diam - diam naik ke kapal dan membunuh musuh - musuh.¹⁶⁾ Pemerintah Jepang yakni Bakufu Tokugawa dilanda dilema. Pada satu sisi, ingin mempertahankan politiknya yang sudah berlangsung lama, namun kekuatan yang jauh di bawah Amerika juga menjadi pertimbangan di sisi lain. Suatu hal yang luar biasa, Bakufu mengundang seluruh daimyoo untuk berunding. Selama perundingan, terjadi perdebatan. Hanya ada dua pilihan untuk menjawab surat dari Amerika tersebut yakni ya dan tidak. Karena dua pilihan ini maka muncul perpecahan. Kubu yang dipimpin oleh Ii Naosuke menginginkan agar Jepang dibuka (kaikoku). Sedangkan

¹⁶Fujita Shozo, "Semangat Restorasi Meiji", dalam Mochtar Lubis (prakata), Kekuatan yang Membisu, Kepribadian dan Peranan Jepang, (Jakarta : Sinar Harapan dan Yayasan Obor Indonesia, 1981)

kubu yang lain menyerukan iooi atau usir bar - bar (anggapan bangsa Jepang terhadap bangsa Barat). Kubu ini dipimpin oleh Nariaki (1800 - 1860). Umumnya, orang - orang yang tergabung dalam kelompok Nariaki adalah orang - orang yang tidak senang pada Bakufu Tokugawa. Orang - orang ini terutama adalah para daimyoo tozama seperti Satsuma dan Chooshuu. Suasana ini memberi peluang bagi mereka untuk menunjukkan ketidaksenangan mereka terhadap Bakufu dengan menempatkan diri sebagai kelompok oposisi.

Pada saat pemerintah Jepang masih dilanda perpecahan dan belum mendapatkan kesepakatan, Perry yang melihat keaktifan perhatian Rusia terhadap Jepang, merasa kedatangannya harus dipercepat karena Rusia dapat menggagalkan rencananya. Perry masih tetap menggunakan strateginya yakni menggunakan dukungan militer sebagai alat bantu dalam berdiplomasi. Kali ini , ia membawa kekuatan yang lebih besar lagi yakni membawa kapal uap berikut 4 sekocinya, kapal perbekalan dan 10 kapal perang.¹⁷⁾ Pemerintah Jepang tidak punya pilihan lain. Dari pada hancur oleh senjata Amerika, kaikoku-lah yang dipilih. Penandatanganan perjanjian dilaksanakan pada tanggal 31 Maret 1854.

Adapun dua pasal yang disebutkan I Ketut Surajaya yang menunjukkan bahwa isolasi Jepang tidak dapat

¹⁷AL Sadler, A Short History of Japan, (Sydney : Angus and Robertson LTD., 1946), h. 265 - 266

dipertahankan lagi adalah sebagai berikut :¹⁾

Pasal II : Pelabuhan Shimoda di Idzu dan pelabuhan Hakodate di Matsumai, agar dibuka oleh Jepang sebagai pelabuhan persinggahan kapal Amerika, di mana mereka dapat mengambil persediaan kayu, air, perbekalan, batu bara dan barang dagangan lainnya- yang diinginkan Amerika Serikat, sepanjang Jepang memilikinya.

Pasal III : Apabila kapal Amerika kandas atau terdampar di pantai Jepang, maka kapal Jepang diharapkan untuk membantu mereka dan membawa awak kapal mereka ke Shimoda, atau Hakodate.

Melihat isi dari dua pasal tersebut, jelas keinginan Amerika dalam misi Perry telah tercapai. Sebagai timbal balik yang tidak seimbang, Amerika memberikan hadiah berupa miniatur rel kereta api, telegraph, buku - buku dan minuman keras. Perjanjian ini diikuti oleh bangsa - bangsa lain seperti dengan Inggris (Oktober 1854), Rusia (Februari 1855), dan Belanda (November 1856).²⁾ Semua perjanjian ditandatangani oleh shogun yang dikira bangsa Barat menduduki jabatan sebagai tenno yang memegang

¹⁸ Ketut Surajaya, Pergerakan Demokrasi Jepang. (Jakarta : Karya Unipress, 1984), h. 18

¹⁹ G.B.Sansom, The Western World and Japan, (London : The Greaser, 1950), h. 293

kekuasaan keduniawian.

Rupanya perjanjian ini belum cukup bagi bangsa - bangsa Barat. Amerika mengirimkan misinya lagi. Kali ini, misi dipimpin oleh Townsend Harris. Bakufu Tokugawa tetap tidak memperlihatkan kekuatannya untuk menahan orang - orang Barat. Penandatanganan perjanjian dilakukan kembali oleh Bakufu yang diwakili oleh Ii Naosuke dan Townsend Harris yang mewakili pemerintah Amerika. Penandatanganan dilaksanakan pada tanggal 29 Juli 1858. Isi perjanjian sesuai dengan misi Harris yang sepenuhnya merupakan misi dagang. Adapun isi perjanjian tersebut adalah sebagai berikut :²⁰⁾

- (1) Jepang menyetujui pengangkatan duta Amerika di Edo dan konsul - konsul di kota - kota pelabuhan yang dibuka untuk perdagangan asing.
- (2) Jumlah pelabuhan yang dibuka ditambah empat.
- (3) Perdagangan bebas dan kediaman warga negara Amerika di kota - kota di Edo dan Osaka.
- (4) Eksteritorialitet.
- (5) Penetapan peraturan bea untuk perdagangan asing.
- (6) Kebebasan warga negara Amerika melakukan ibadat agamanya.
- (7) Larangan impor candu.
- (8) Klausul "The most favour nation" atau negara yang diistimewakan.

²⁰⁾Dasuki, op.cit. h. 8

- (9) Pertukaran bebas mata uang Jepang dengan mata uang asing.
- (10) Peninjauan kembali perjanjian tersebut setelah 4 Juli 1872, jika ada usul dari salah satu pihak.

Mengulang peristiwa perjanjian di Kanagawa, perjanjian dengan Amerika diikuti pula perjanjian dengan bangsa - bangsa Barat yang lain. Perjanjian tersebut berturut - turut diadakan antara Jepang dengan Belanda (18 Agustus); Rusia (19 Agustus) ; Inggris (26 Agustus); dan Perancis (7 Oktober) pada tahun yang sama.²¹⁾

Berdasarkan isi perjanjian tersebut sudah jelas menunjukkan bahwa Jepang sudah tidak lagi tertutup atau telah sungguh-sungguh terbuka. Nomer satu yang menyebutkan penempatan duta dan konsul mengandung arti bahwa ada hubungan diplomatik antara bangsa Jepang dengan negara - negara yang menempatkan duta dan konsulnya. Selain itu, isolasi Jepang yang diadakan atas dasar kekhawatiran penguasa terhadap pengaruh kristen tidak berlaku dengan adanya pernyataan kebebasan warga negara Amerika yang umumnya beragama kristen menjalankan ibadat agamanya dalam perjanjian tersebut. Jepang tidak memiliki alasan lagi. Apabila ia ingin mempertahankan isolasinya, ia harus memiliki alasan baru dan memungkinkan untuk membatalkan perjanjian. Namun, pemerintah tidak melakukannya karena ketakutan akan kekuatan militer bangsa Barat lebih dominan. Tindakan ini tentu saja menimbulkan

²¹Paul H. Clyde, op. cit. h. 127



kekecewaan bagi pihak yang menginginkan Jepang tetap tertutup. Kekecewaan yang dirasakan mulai dari perjanjian dengan Perry dan Harris mendorong terjadinya banyak kemelut di Jepang.

B. Dampak-dampak Pembukaan Jepang

1. Bidang Sosial Budaya

Dampak pembukaan Jepang dapat dilihat dalam bidang sosial budaya. Kontak langsung antara Jepang dan bangsa - bangsa Barat membawa angin perubahan yang lebih dalam lagi di bidang sosial budaya. Budaya Barat yang telah lebih dulu maju dan masuk ke Jepang telah mengakui keunggulan ilmu dan teknologi Barat.

Perlu diketahui, sebelum Jepang dibuka, perkembangan dunia pemikiran yang memfokuskan pada pengetahuan Barat sudah ada dari aliran Rangaku tetapi dalam lingkup yang terbatas. Usaha penterjemahan buku sangat terbatas dan dilaksanakan dengan susah payah mengingat penguasaan bahasa yang sangat kurang. Pemerintah tidak ikut berpartisipasi.

Setelah Jepang dibuka, pemerintah ternyata menyadari akan kebutuhannya pada pengetahuan yang berasal dari Barat. Pada tahun 1857, Bakufu mendirikan suatu lembaga yang khusus mempelajari buku - buku dari Barat. Awalnya, kurikulum hanya seputar Belanda. Sejak perjanjian lebih jauh yang dilakukan oleh Harris, Bakufu merasa perlu pula untuk mendalami pengetahuan tentang

bangsa - bangsa yang lain. Pada tahun 1860, mata pelajaran bahasa tidak hanya bahasa Belanda saja tapi juga bahasa bangsa - bangsa Barat yang lain. Pada tahun 1863, lembaga ini diresmikan menjadi perguruan tinggi.

Tindakan lain dilakukan pula oleh Bakufu. Sebelum lembaga tersebut diatas diresmikan atau pada tahun 1862, Bakufu mengirimkan sekelompok orang yang terdiri dari 8 orang untuk belajar di Netherland. Seolah - olah menjadi pelopor, kegiatan ini menjadi contoh bagi han - han. yang lain dan bahkan, han yang memusuhinya seperti Chooshuu dan Satsuma juga mencontohnya. Pada tahun 1863, Chooshuu mengutus 5 pelajarnya ke Inggris. Satsuma mengirimkan 16 orang ke Inggris pula pada tahun 1864. Tidak hanya sistem kelompok sebagai keputusan han, sejumlah pelajar secara pribadi banyak yang berangkat ke luar negeri. Rupanya hubungan ini juga memacu minat orang muda di Jepang untuk belajar bahasa - bahasa Barat dari para misionaris dan para instruktur Jepang yang ahli dalam bidang ini.²²⁾

Wawasan pengetahuan yang luas dan kemampuan berpikir yang telah ada dalam diri bangsa Jepang memunculkan berbagai gagasan dan pendapat atas kondisi baru yang sangat tiba-tiba ini. Sakuma Zozan, seorang konfusian nasionalis memberikan pendapatnya sebagai berikut;²³⁾

" Dalam pengajaran moral, kebajikan dan

²²Mikiso Hane, Premodern Japan, (USA : Westview Press, 1991), h. 212-213

²³Ibid., h. 217

kebenaran, kealiman, persaudaraan, kesetiaan dan iman, kita harus mencontoh pandangan Cina. Dalam astronomi, geografi, angkatan laut, penelitian, analisa pemikiran, persenjataan, perdagangan, kedokteran, mesin dan konstruksi, kita harus menghadap ke Barat. Kita harus mengambil point - point penting dari dunia ini dan menjadikannya pelajaran penting bagi bangsa Jepang."

Berbeda dengan Sakuma, seorang Chooshuu yang pandai yakni Yoshida Shoin memberikan pandangannya tentang kedatangan Barat ke Jepang.

"Amerika menyebabkan tanah Dewa tercemar. ... Ini merupakan tindakan kejahatan shogun. Surga dan bumi tidak akan mengampuninya. Kemarahan para dewa dan manusia muncul. Sekarang, ia pantas untuk dihancurkan dan dibunuh sesuai dengan prinsip - prinsip kebenaran yang mendasar. Tidak ada belas kasihan."²⁴)
Jadi, satu akibat yang penting berkenaan terjadinya

Restorasi Meiji adalah dunia pemikiran semakin kritis melihat gejala - gejala yang ada dalam masyarakat. Banyak hasil pemikiran muncul. Dari sinilah muncul pengertian nasionalisme sebagai paham yang mengajarkan cinta tanah air.

Dengan adanya kontak dan akulturasi memberi demonstration effect terhadap masyarakat Jepang. Ada beberapa orang Jepang yang naik ke kapal bangsa Barat setelah perjanjian melihat kehebatan bangsa Barat. Pemimpin Jepang yang melakukan perjanjian diundang acara makan malam berikut minum minuman keras dengan melakukan toast lebih dahulu. Cara berpakaian Barat yang praktis dibanding dengan bangsa Jepang. Penghargaan yang lebih terhadap bangsa Barat mendorong bangsa Jepang untuk meniru

²⁴Ibid... h.216

agar dapat sama atau sejajar dengan bangsa Barat.

2. Bidang Ekonomi

Sejak dibukanya hubungan dagang yang tercakup dalam perjanjian 1858, kehidupan ekonomi agraris Jepang yang telah dikacaukan oleh meluasnya penggunaan uang dapat dikatakan semakin kacau. Dampak yang diakibatkan dari pembukaan hubungan dagang ternyata lebih banyak menguntungkan bangsa Barat. Sesuai dengan tujuan mencari daerah pemasaran bagi hasil industrinya, bangsa-bangsa Barat banyak mendatangkan barang ke Jepang. Mereka mendatangkan barang dalam skala yang besar. Jumlah yang besar dapat dipenuhi karena dukungan industri mekaniknya. Spekulasi dan sistem persaingan juga dibawa masuk ke Jepang. Mereka berani menjual di pasaran luas di Jepang untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Sebagaimana tadi telah disebutkan, demonstration effect melanda masyarakat sehingga segi kebutuhan pun terpengaruh. Keuntungan yang diraih pun terus meningkat. Pada tahun 1863 keuntungan yang diraih ditaksir mencapai 4.750.000 ryoo dan hanya memerlukan waktu dua tahun yakni tahun 1865, keuntungan meningkat menjadi 6.580.000 ryoo.²⁵⁾

Peningkatan ini terjadi karena mereka berani bersaing dengan barang - barang dalam negeri. Selain itu, karena mereka memiliki kebebasan mencari keuntungan, mereka sering melakukan hubungan langsung dengan pedagang

²⁵Toyoda Takeshi, A History of Pre-Meiji Commerce in Japan, (Tokyo : Kokusai Bunka Shinkokai, 1969), h. 61

di pedalaman yang waktu itu memang menduduki posisi pula sebagai pengumpul barang - barang komoditi langsung dari produsen. Jelas ini sangat mengganggu sirkulasi perdagangan Jepang yang telah memiliki struktur distribusi yang lengkap. Sirkulasi terganggu karena bangsa - bangsa Barat mengambil jalan pintas yang memotong sirkulasi perdagangan. Akibatnya, terjadi kelangkaan barang produk dalam negeri. Selanjutnya, permintaan lebih banyak daripada penawaran sehingga harga barang menjadi meningkat. Toyoda dalam bukunya mencatat barang - barang yang naik harganya sepanjang tahun 1854 - 1865. Harga sutera kasar selalu berjalan naik sekitar tiga kali lipat, harga teh dua kali lipat dan harga kepompong yang merupakan bahan mentah yang pokok bagi pembuatan kain sutera mencapai sepuluh kali lipat. Tidak hanya itu, bahan makanan pokok pun juga mengalami kenaikan. Meski tidak disebutkan berapa kali lipat, kenaikan yang sedikit pun tetap dirasakan dalam kondisi ekonomi yang kacau.

Untuk lebih jelas lagi bahwa perdagangan setelah Jepang terbuka kacau dapat dilihat dari gambaran yang diberikan oleh Fukuzawa Yukici yang menggambarkan tentang dampak pembukaan Jepang terhadap gerak para pedagang Jepang yang secara langsung berhadapan dengan bangsa - bangsa Barat.

"Setelah Jepang terbuka, seorang pedagang dengan bersusah payah memberanikan diri untuk berdagang dengan orang - orang asing di Yokohama. Pada mulanya ia merasa takut melihat badan - badan mereka yang tinggi, kemudian melihat jumlah uangnya yang banyak, kantor dagangnya yang luas dan kapal - kapal mereka cepat. Akhirnya pedagang Jepang putus asa... ia akan

bingung menghadapi teknik - teknik dagang asing. Didesak oleh tuntutan yang tidak wajar, muncul kebingungan dan gemetar. Karena kuasa dan gengsi, akhirnya mengalah.²⁶⁾

Kekacauan dalam dunia perdagangan ini pernah diatasi oleh Bakufu. Pada tahun 1863, Bakufu kembali menutup pelabuhan Yokohama. Tindakan ini dapat menekan barang komoditi yang ke luar dari pelabuhan itu, termasuk jumlah sutera kasar yang diekspor. Namun penutupan pelabuhan ini ditentang oleh para pedagang pedalaman yang telah mendapatkan keuntungan dari kerjasamanya dengan pedagang bangsa Barat. Tekanan juga dilakukan oleh bangsa Barat yang merasa dirugikan. Campur tangan bangsa Barat ini membuat Bakufu tidak punya pilihan lagi selain menghapuskan kebijakan penutupan pelabuhan Yokohama.

Kekacauan ekonomi terjadi pula akibat dari sistem moneter yang tidak terintegrasi. Masing - masing wilayah han mengeluarkan uang kertas untuk menanggulangi masalah keuangannya. Di samping itu, masa ini dikenal dengan sistem standar ganda. Di Edo menggunakan standar emas sedangkan di Osaka menggunakan standar perak. Tanpa hubungan dengan luar saja sudah dipastikan kacau oleh karena permainan spekulasi para pedagang Jepang sendiri. Kekacauan semakin parah ketika Jepang dibuka. Perjanjian 1858 menyebutkan bahwa pertukaran bebas mata uang diijinkan. Jelas ini sangat merugikan Jepang. Kerugian terletak pada akibat dari ratio antara emas dan perak di Jepang dan

Fukuzawa Yukichi, Jepang Diantara Feodalisme dan Modernisme, (Jakarta : Pantja Simpati, 1985), h. 50

merupakan keturunan Dewi Matahari yang menguasai tanah Jepang. Sedangkan shogun merupakan pejabat yang diangkat kaisar mengingat gelar itu sendiri diberikan oleh kaisar. Tradisi tetap tidak bisa dihilangkan begitu saja meskipun Shogun pernah mengeluarkan peraturan Kinchu Narabini Kuge Sho-hatto (peraturan kegiatan bangsawan dan kekaisaran) untuk mencegah bangkitnya kembali kekuasaan mereka. Penjelasan G.B Sansom mengungkapkan bahwa faktor pertama yang utama dalam kekuasaan Tokugawa ditempatkan pada faktor hubungannya dengan kaisar. Apabila hubungan ini tidak harmonis maka akan jadi malapetaka bagi kekuasaan shogun. Penolakan tidak membuat pemerintahan shogun sadar. Hal ini terbukti dengan dilakukannya perjanjian dengan Harris yang isinya berdampak lebih radikal lagi bagi kelangsungan politik isolasi Jepang. Perpecahan tidak dapat dielakkan lagi.

Sementara konflik sekitar politik luar negeri berlangsung, konflik terjadi juga dalam pemerintahan berkaitan dengan pemilihan pengganti shogun. Pada masa ini, shogun Iesada (1824 - 1858) tidak meninggalkan keturunan. Ii Naosuke mencalonkan Iemochi dan Nariaki dari Tokugawa cabang Mito mencalonkan anaknya, Yoshinobu. Kemenangan diraih oleh Iemochi. Kemenangan ini lebih banyak menghambat ruang gerak dari oposisi yang dipimpin Nariaki mengingat kemenangan Iemochi merupakan pula kemenangan kelompok yang dipimpin oleh Naosuke. Sejalan dengan naiknya Iemochi sebagai shogun, Naosuke menduduki jabatan sebagai penasehat. Suatu kebiasaan di Jepang bahwa

pemerintahan dipegang oleh sekelompok orang (oligarkhi), pemerintahan ini pun demikian. Naosuke merupakan orang yang paling berpengaruh. Karena kebenciannya pada kelompok Nariaki, ia melakukan penangkapan dan penahanan Nariaki serta memberhentikan Yoshinobu (Keiki). Tidak hanya itu, ia melakukan penyiksaan terhadap orang - orang yang melawannya atau mendukung Yoshinobu, memecat penasehat - penasehat bangsawan yang anti-Bakufu dan menghukum mati para samurai yang menentang dan mengkritik Bakufu. Tindakan yang dijalankan ini dikenal dengan Pembersihan Era Ansei.

Pada masa ini, kritik - kritik yang menyudutkan Bakufu terutama tentang legalitasnya telah banyak muncul sejalan dengan perkembangan dunia pemikiran. Satu kritik dari seorang korban yakni Yoshida Shoin (1830 - 1859) yang enam bulan sebelum kematiannya, menulis:²⁸⁾

"Sepanjang Tokugawa berada, orang - orang Amerika, Inggris dan Perancis akan terus berkuasa. Situasi ini sangat genting. Bagaimana dapat darah merah orang tahan melihat negara besar kita yang tetap merdeka dan damai selama 3000 tahun menjadi diperbudak oleh negara - negara lain?"
Ia memang terlalu berlebihan dalam menuliskan damai selama 3000 tahun. Namun, tulisan ini sekurang - kurangnya dapat mewakili perasaannya yang tergugah melihat kondisi Jepang terutama akibat dari pembukaan Jepang kedua yang dilakukan oleh Amerika.

Sejalan dengan buruknya kondisi ekonomi, perhatian

²⁸Ibid. h.216

para cendekiawan yang memang tugasnya adalah merumuskan masalah, mencari penyelesaian, menemukan ide penyelesaian dan menyebar luaskan tidak melewatkan keadaan yang terjadi di Jepang setelah terbuka. Penelitiannya kemudian menyangkut pada apa yang menjadi penyebab keadaan Jepang menjadi buruk dan bagaimana menyelesaikannya.

Umumnya para cendekiawan Jepang Tokugawa berasal dari kalangan samurai. Kelas samurai adalah kelas yang paling banyak mendapat kesempatan mengenyam pendidikan pada masa Tokugawa. Kalangan samurai adalah juga kelas masyarakat yang paling merasakan akibat dari keburukan ekonomi karena mereka kurang dapat menyesuaikan perubahan yang tiba - tiba ini. Beras yang diterimanya sebagai pendapatan tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya setelah "diuangkan". Hasil dari penyelidikan menunjuk pada masuknya bangsa Barat sebagai sebab utama. Siapa penyebab bangsa Barat dapat masuk ke Jepang? Penyebab masuknya bangsa Barat tidak lain adalah Bakufu. Bakufulah yang bersedia menanda tangani perjanjian sebagai tanda bahwa Jepang terbuka.

Samurai yang melakukan propaganda ini terutama berasal dari Jepang Barat yang merupakan wilayah daimyoo tozama. Diskriminasi yang dilakukan Bakufu Tokugawa terhadap para daimyoo tozama ini membuat mereka sangat membenci Bakufu. Merekalah yang meramalkan perpecahan dalam gelanggang politik dan memainkan peranan dalam gerakan yang dikenal dengan gerakan sonno jooi. Mereka tidak memiliki kesetiaan lagi pada pemerintah Bakufu yang

selama ini memegang hegemoni kekuasaan. Kesetiaan mereka diarahkan pada penguasa tertinggi yang sejati yakni kaisar.

Telah disebutkan bahwa setelah perjanjian 1858, perpecahan terjadi dalam pemerintahan Tokugawa. Sonno jooi merupakan semboyan dari gerakan yang dilakukan oleh para pendukung anti-Barat. Suatu gerakan pendukung sonno jooi yang membuat pemerintah harus berhati - hati terhadap kelompok ini adalah pembunuhan Naosuke pada tanggal 24 Maret 1860. Pembunuhan dilaksanakan oleh aktivis dari Mito dan ronin yang telah berkelompok dan menamakan dirinya sebagai kelompok shishi (orang yang bercita - cita mulia). Pembunuhan terhadap Naosuke didasarkan pada rasa dendam atas kematian teman - temannya yang menjadi korban Pembersihan Ansei. Pembunuhan juga dilakukan terhadap juru bicara Townsend Harris yakni Henry Heusken pada bulan Januari 1861. Wakil - wakil bangsa Barat kecuali Harris melakukan pemogokan di sepanjang Edo dan Yokohama sebagai tanda protes terhadap shogun yang dianggap gagal memberi perlindungan. Sedangkan, Harris melakukan tindakan memperkuat diri.²⁹⁾ Belajar dari kejadian ini membuat Bakufu yang kehilangan orang yang paling berpengaruh menjadi hati - hati. Berbagai usaha perdamaian dilaksanakan. Pada tahun 1862, perkawinan dilaksanakan antara Shogun Iemochi dengan Puteri Kazunomiya, adik

²⁹Paul H.Clyde, op.cita h. 128

kaisar. Perkawinan diharapkan akan membentuk aliansi antara Bakufu dan kaisar. Aliansi ini dikenal dengan nama kobun-gattai (persatuan bangsawan dan militer). Aliansi ini didukung oleh Satsuma, Echizen dan Aizu.³⁰⁾

Meskipun kobun-gattai telah dilaksanakan, perselisihan tidak berhenti. Satu sebab perselisihan adalah perbedaan tujuan dibentuknya aliansi ini. Tujuan Bakufu ingin menghidupkan kembali kekuasaan otokratik mereka mengingat shogun dan kaisar telah menyatu. Paling tidak , tindakan ini dapat menghapuskan kesalahan - kesalahan Bakufu yang telah mengadakan persetujuan dengan bangsa Barat tanpa persetujuan dari kaisar. Tujuan dari pihak yang anti-Bakufu adalah usaha memperoleh peluang bagi han - han besar mengawasi pemerintahan. Seakan - akan telah mendapat pengesahan dengan aliansi ini, penasihat keuangan Bakufu, Oguri Tadamasa berusaha memperoleh dukungan dari Barat dalam hal ini meminta tolong pada Leon Roches, menteri dari Perancis untuk memberi nasehat dan bantuan. Dengan dukungan ini, Bakufu dapat memperkuat militernya dan mendirikan pemerintahan nasional yang kuat di bawah Bakufu.³¹⁾ Tindakan ini mengangkat kembali perselisihan dan aliansi gagal.

Golongan anti Bakufu yang telah bergabung dengan bangsawan pendukung kaisar semakin tidak percaya akan

³⁰Mikiso Hane, op. cit. h. 217

³¹Ibid. h. 221

kemampuan Bakufu dalam memerintah Jepang. Shogun sebagai kepala pemerintahan dituntut terus menerus untuk mengembalikan kekuasaannya ke tangan kaisar. Salah seorang patriot yang memiliki pengaruh besar yakni Nariaki pernah menuliskan,

"Di masa yang suram ini, orang - orang cenderung berpegang teguh pada perdamaian; mereka tidak suka membela negara dengan berperang."³²⁾

Kelompok anti-Bakufu tidak suka dengan tindakan yang dilakukan oleh Oguri. Bila dikaitkan dengan isi tulisan Nariaki, tindakan Oguri sama halnya dengan pernyataan yang pertama. Bila dikaitkan lagi dengan isu yang ada di kalangan samurai yang menunjuk masuknya bangsa Barat sebagai penyebab suramnya suasana di Jepang, tindakan Oguri ini tidak memecahkan masalah bangsa Jepang melainkan memasukkan lebih dalam lagi unsur penyebab tersebut.

Pada bulan September 1862, C.L. Richardson orang Inggris dibunuh dekat Yokohama. Kejadian ini terjadi pada saat Satsuma berpapasan dengan rombongan Richardson. Richardson dianggap tidak sopan karena tidak turun dari kudanya. Pada dasarnya sudah benci, orang - orang Satsuma membunuhnya.

Tindakan Satsuma ini membuat bangsa Inggris marah. Pada tahun 1863, Inggris mengajukan tuntutan kepada pemerintah Jepang. Isi tuntutan Inggris terdiri dari (1) pembayaran ganti rugi sebesar 100.000 pon, (2)

³²⁾Ibid., h.211

kerugian sebesar 25.000 pon dibayar oleh Satsuma dan (3) pemeriksaan pengadilan dan penghukuman menurut Inggris.³³⁾ Suatu ujian kembali dihadapi Bakufu dalam usaha melestarikan kekuasaannya.

Sementara itu, pada bulan Maret tahun yang sama, shogun Iemochi sendiri melakukan perjalanan ke Kyoto untuk mengadakan musyawarah dengan kaisar dan para pendukungnya. Hasil musyawarahnya adalah berupa kesepakatan mengusir orang - orang asing dan menutup kembali Jepang pada tanggal 24 Juni 1863.³⁴⁾ Kesepakatan ini secara implisit mengandung tantangan dari pihak kelompok anti kaisar yang didukung oleh kaisar dan bangsawan istana terhadap shogunat Tokugawa. Kenyataan yang terjadi, tuntutan Inggris tentang pembayaran kerugian dipenuhi dan pada tanggal 24 Juni 1863, ia tidak melakukan seperti yang diharapkan kaisar.

Rupanya Chooshuu sudah tidak sabar lagi melihat sikap yang ditunjukkan pemerintahan Jepang. Ia mengambil tindakan sendiri. Pengusiran dilakukan dengan kekerasan. Chooshuu melancarkan serangan terhadap orang - orang asing. Pada tanggal 24 Juni 1863, kapal Amerika yang sedang berlabuh di Selat Shimonoseki dibakar. Pada tanggal 8 Juli tahun yang sama, giliran kapal Perancis. Nasib yang sama dialami juga oleh kapal perang Belanda pada tanggal

³³Paul H. Clyde, op.cit. h.129

³⁴Dasuki, op.cit. h. 11

11 Juli 1863.³⁵⁾

Sikap anti-asing memancing kemarahan bangsa - bangsa Barat. Pada bulan Agustus 1863, Inggris menghancurkan Kagoshima, ibukota Satsuma. Sedangkan pembalasan terhadap Chooshuu dilakukan dengan kekuatan gabungan antara Amerika, Inggris, Perancis dan Belanda pada bulan September 1863 sehingga mengakibatkan benteng - benteng Chooshuu rata dengan tanah.

Kekalahan tidak membuat Satsuma dan Chooshuu merasa rendah sebagai orang Jepang karena mereka telah menunjukkan semangat membela negara dengan berperang meskipun kalah. Tindakan ini memiliki nilai yang tidak merendahkan bangsa Jepang dan sebagai wujud dari nilai keberanian yang terkandung dalam Bushido. Bahkan dengan sikap sportif membuka diri terhadap pengetahuan asing terutama bidang militer. Keputusan yang diambilnya juga bukan merupakan keputusan yang tidak relevan dengan slogan sonno jooi. Mereka tetap setia pada kaisar dan tetap berkeinginan mengusir bangsa Barat. Namun, strategi yang dipilih berbeda dari sebelumnya karena mereka telah belajar dari pengalaman. Strateginya yang baru adalah mengimbangi kekuatan militer bangsa Barat guna memperkuat militernya. Untuk memperkuat, mereka melakukan alih teknologi Barat. Secara sosiologi dapat dijelaskan bahwa konflik yang telah terjadi membuka wawasan mereka akan kekuatan yang lain yang ternyata melebihi mereka dan memacu mereka untuk

³⁵G.B. Sansom, op. cit. h.318

berubah.

Perubahan yang terjadi pada Satsuma dan Chooshuu tidak sampai pada sikap antinya terhadap Bakufu. Hal ini diakibatkan oleh latar belakang sejarah kekalahan dalam perang di Sekigahara yang memaksa mereka untuk tunduk pada shogunat Tokugawa. Dengan adanya perbedaan tanggapan atas kedatangan bangsa Barat memberi kesempatan bagi mereka untuk menunjukkan kebenciannya. Sikap lunak pemerintah de facto terhadap bangsa Barat di bawah kekuatan militer Barat membuat legitimasi kekuasaannya pun berkurang karena dianggap sudah tidak mampu lagi mempertahankan bangsa Jepang. Tentang upaya - upaya perdamaian yang dilakukan oleh Bakufu terhadap oposisinya dipandang sebagai suatu permainan politik Bakufu saja untuk mempertahankan kekuasaannya. Sebagai contoh, Chooshuu membiarkan kelompok yang suka berperangnya atau beraliran keras atau ekstrimis melakukan pemberontakan pada bulan Agustus 1864 sebagai aksi protesnya sekaligus sebagai ungkapan kekhawatiran mereka akan kekuasaan kaisar. Sedangkan Satsuma yang juga anti Bakufu punya strategi yang lain yakni lebih moderat dalam sikapnya ini. Dikatakan moderat karena pada saat tertentu ia masih membantu Bakufu terutama ketika dilakukan penumpasan pemberontakan Chooshuu. Tetapi sikap ini dilakukan karena kesetiaannya pada kaisar yang telah melakukan perjanjian dengan Bakufu. Sikap ini menjadi sarannya untuk lebih berpengaruh. Dapat dikatakan "musuh dalam selimut" merupakan peran yang diambil oleh Satsuma.

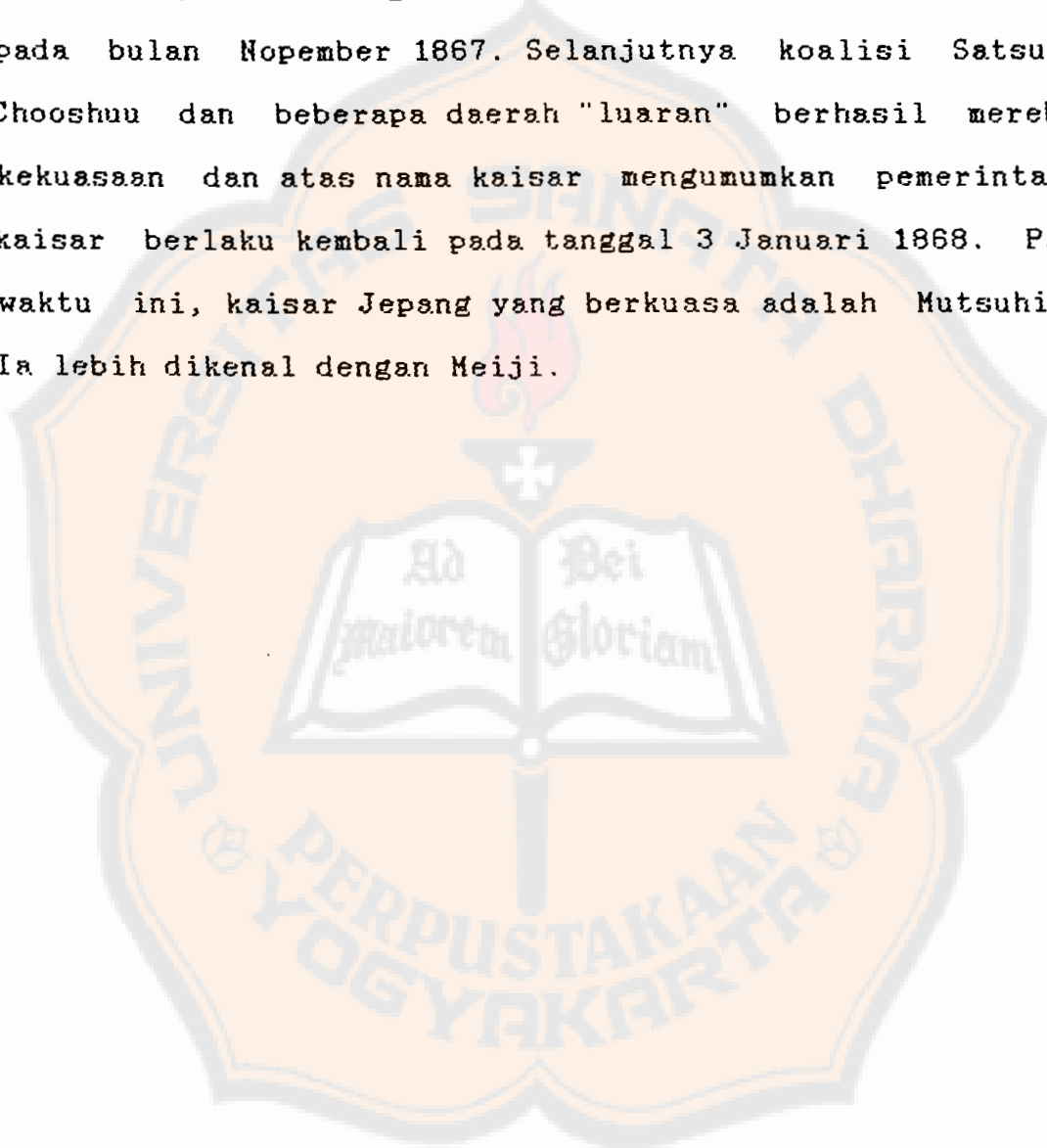
Terbukti, pada akhir tahun 1864, setelah pemberontakan . Chooshuu berhasil ditumpas, ia kemudian memberikan persenjataan yang diperolehnya dari Inggris kepada Chooshuu. Perlu disebut tokoh yang terlibat adalah Kido, Ito dan Inouye. Pada tahun 1866, mereka bahkan mengadakan uni-kekuatan melalui pertemuan rahasia antara Chooshuu dan Satsuma yang masing - masing diwakili oleh Saigo dan Kido. Duduk sebagai mediator adalah Sakamoto Ryooma dari Tosa.³⁶⁾ Pertemuan ini berhasil mencapai suatu kesepakatan untuk bersama - sama menghadapi Bakufu.

Dua kekuatan besar yang merupakan gabungan antara Satsuma dan Chooshuu menjadi hambatan yang paling besar bagi Bakufu untuk mengambil tindakan yang dapat mempertahankan kekuasaannya. Selain itu, Bakufu harus kehilangan "bonekanya" yakni shogun karena kematian *Iemochi* yang tidak meninggalkan putera pada tahun 1866. Bakufu kehilangan "backing" untuk melegitimasi kekuasaannya. Kekosongan jabatan shogun diisi oleh Yoshinobu yang lebih dikenal dengan Keiki.

Kembali pada peristiwa naiknya *Iemochi* menjadi shogun, pihak yang dikalahkannya adalah Yoshinobu, putera *Nariaki* dari kelompok anti-Bakufu. Sekurang - kurangnya pengetahuan tentang kelompok ini ia ketahui. Sikapnya pun tidak terlalu keras terhadap kelompok ini. Lampu kuning Bakufu semakin meredup dan hendak berganti

³⁶Ibid. h.321

yang mendadak di bidang sosial budaya dan ekonomi , kedudukan shogun semakin terjepit. Ternyata tidak menunggu lebih lama lagi, Keiki atau Yoshinobu menyerahkan kekuasaannya ke tangan kaisar. Peristiwa ini dilakukan pada bulan Nopember 1867. Selanjutnya koalisi Satsuma, Chooshuu dan beberapa daerah "luaran" berhasil merebut kekuasaan dan atas nama kaisar mengumumkan pemerintahan kaisar berlaku kembali pada tanggal 3 Januari 1868. Pada waktu ini, kaisar Jepang yang berkuasa adalah Mutsuhito. Ia lebih dikenal dengan Meiji.



B A B III

LATAR BELAKANG KEBERHASILAN PEMBAHARUAN MEIJI

A. Tokoh - Tokoh Pembaharuan Meiji

Pada bab sebelumnya, kaisar dinyatakan kembali berkuasa atas tanah Jepang. Sebagaimana biasanya, seseorang atau sekelompok orang yang telah menduduki jenjang kekuasaan selalu mengeluarkan kebijaksanaan. Pemerintahan Kaisar Meiji juga mengeluarkan kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintahan Meiji dikenal dengan pembaharuan. Kebijaksanaan ini sesungguhnya merupakan lanjutan dari perjuangan mengembalikan kekuasaan ke tangan kaisar mengingat slogan yang dicetuskan adalah *sonno jooi*.

Demi terwujudnya suatu kebijaksanaan diadakan pelaksanaan kebijaksanaan. Pelaksanaan kebijaksanaan adalah penggunaan sarana - sarana yang dipilih untuk mencapai tujuan. Dari definisi ini, tindakan - tindakanlah yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijaksanaan. Faktor yang berkaitan erat dengan tindakan adalah faktor aktor yang terlibat karena aktor merupakan orang-orang yang memegang peranan baik dalam perencanaan sehingga menjurus pada lahirnya kebijaksanaan maupun pelaksanaannya. Hal ini membuat keberhasilan suatu kebijaksanaan sangat tergantung pada para aktor yang terlibat. Pembahasan dalam bab ini akan mengulas tentang faktor aktor yang memegang peranan penting dalam pelaksanaan kebijaksanaan Jepang masa Meiji

sehingga berhasil.

Dua puluh lima tahun pertama setelah peristiwa pengembalian kekuasaan ke tangan kaisar, prakarsa dan pelaksanaan pemerintah yang sesungguhnya adalah orang-orang dibalik nama kaisar yang turut andil dalam perjuangan menggulingkan shogunat. Sebagian besar dari mereka adalah sekelompok pembaharu yang muda dari pangkat samurai menengah dan rendah. Mereka berasal dari Satsuma-han, Chooshuu-han, Hizen-han dan Tosa-han. Mereka membentuk semacam pemerintahan oligarkhi karena waktu itu kaisar masih berumur 15 tahun.

Untuk mempermudah penjelasan tentang faktor aktor perlu diketahui dahulu siapakah aktor-aktor yang terlibat dan berperan besar dalam pembaharuan masa Meiji.³⁷) Pertama, Kido Koin (1835 - 1877) dari Chooshuu. Ia berhasil membangun aliansi kekuatana han - han dari Barat untuk melawan Tokugawa sebelum terjadi restorasi. Pada tahun 1871 sampai 1873, ia pernah mengikuti misi ke Eropa dan Amerika yang dipimpin oleh Iwakura. Dalam proses pemusatan kekuasaan, ia membujuk bangsawannya yakni Moori Yoshichika dari Chooshuu untuk menyerahkan wilayah kekuasaannya pada kaisar (1868). Selain itu, ia juga membujuk bangsawan di Yamaguchi. Kemudian Kido menjabat menteri pendidikan.

Ke-dua, Saigo Takamori (1828 - 1877) dari Satsuma.

³⁷John W.Hall, Japan from Pre-history to Modern Times, (Tokyo : Charles E.Tuttle, 1983), h. 268

Sebagaimana Kido, ia juga termasuk dalam tokoh yang membentuk aliansi han - han dari Barat. Saigo merupakan salah satu menteri dalam masa awal pemerintahan Meiji. Sejak kecil, ia senang dengan latihan militer. Hal inilah yang menyebabkan ia memperoleh tingkat tinggi dalam barisan samurai daimyonya. Pada tahun 1874, ia mendapat gelar perwira tinggi. Meskipun ia keluar dari pemerintahan karena perbedaan pendapat, ia tetap berperan terutama melalui lembaga pendidikan yang ia dirikan di Kagoshima (shi-gakkoo).

Ke-tiga, Okubo Toshimichi (1830 - 1878) berasal dari Satsuma, termasuk dalam jajaran anggota dalam pemerintahan Meiji. Turut membujuk penguasa daerahnya yakni Shimazu Narishige untuk menyerahkan wilayahnya ke tangan kaisar (1867). Okubo pernah menjabat sebagai menteri keuangan. Ia merupakan salah satu anggota misi pimpinan Iwakura ke luar negeri pada tahun 1871. Sekembalinya, ia menjabat menteri dalam negeri. Tahun 1874, ia diserahi tugas memberantas pemberontakan Etou Shimpei di Saga.

Ke-empat, Itagaki Taisuke (1837 - 1919) dari Tosa. Salah satu tokoh berpikiran progresif akibat pengaruh pengetahuan tentang negara Barat yang dimilikinya. Ia sangat percaya dengan pembagian kekuasaan yang merupakan pemikiran yang aneh di Jepang masa itu. Itagaki juga menduduki jabatan dalam pemerintahan Meiji meski kemudian mengundurkan diri karena terjadi perbedaan pendapat. Walaupun begitu, di luar pemerintahan, ia tetap ambil bagian dalam kegiatan politik dengan mendirikan organisasi

politik yang dikenal dengan nama Risshisha. Partai ini berkembang pada tahun 1880 menjadi partai politik dalam skala nasional dengan nama *Jiyuto* atau partai liberal.

Ke-lima adalah Goto Shojiro (1838 - 1897) dari Tosa. Goto adalah teman akrab Itagaki. Seorang pelajar yang banyak mempelajari tentang Inggris. Ia pernah memegang jabatan sebagai penasehat daimyoonya. Ia juga pernah menjadi menteri dalam masa Meiji.

Ke-enam adalah Ito Hirobumi (1841 - 1909) dari Chooshuu dan berasal dari keluarga samurai rendah karena adopsi yang kemudian menduduki jabatan sebagai pejabat tinggi negara. Ia merupakan pelajar yang belajar di sekolah keluarga Yoshida Torajiro dan karena kepandaianya, ia menarik perhatian senior - senior Chooshuu. Ia pernah dikirim ke Eropa selama dua tahun (1881 -1883) untuk mempelajari konstitusi di Eropa. Sebelum restorasi (1863), ia termasuk anggota misi yang dikirim chooshuu ke Inggris bersama Inoue Kaoru. Jabatan yang dipegang selama masa Meiji adalah gubernur wilayah Hyoogo, wakil menteri dan termasuk anggota misi Iwakura. Setelah Okubo dan Kido wafat, ia menjadi tokoh politik Jepang yang paling berpengaruh. Ia merupakan penyusun konstitusi dan konstitusi ini disebarluaskan. Dia kemudian menjadi perdana menteri.

Ke-tujuh, Inoue Kaoru (1835 - 1915) dari Chooshuu. Ia merupakan salah seorang anggota Dewan Atas. Inoue juga pernah belajar di Inggris bersama Ito pada tahun 1863. Ia

pernah menjabat sebagai menteri keuangan, menteri luar negeri, menteri dalam negeri dan terakhir memegang jabatan sebagai menteri pertanian dan perdagangan.

Ke-delapan, Okuma Shigenobu (1838 - 1922) dari Hizen. Ia pernah belajar tentang Belanda dan Inggris. Pada tahun 1887, ia memegang jabatan sebagai menteri luar negeri. Pada awalnya, ia merupakan seorang penasehat. Namun, ia pernah diberi tugas untuk membentuk parlemen.

Ke-sembilan adalah Etou Shimpei (1834 - 1874) yang berasal dari Saga (Hizen). Dia adalah wakil menteri pendidikan, menteri kehakiman (1872) dan menjadi *sangi* (Dewan Penasehat). Ketika terjadi perpecahan akibat perbedaan pendapat terhadap masalah Korea, ia keluar dari pemerintahan. Tetapi ia tidak berhenti. Ia tetap peduli dengan nasib bangsa dengan melakukan pemberontakan.

Ke-sepuluh adalah Yamagata Aritomo (1838 - 1922). Jabatan yang pernah dipegang adalah menteri kehakiman, ketua dewan atas dan komandan perang. Ia merupakan bangsawan militer dari Chooshuu.

Selain dari kalangan samurai, ada dua aktor yang berasal dari golongan bangsawan yang memiliki pengaruh besar. Pertama adalah Sanjo Sanetomi (1837 - 1891). Pada tahun 1863, karena adanya tekanan dari Bakufu, ia bersama 6 penasehat lainnya lari ke Chooshuu. Di Chooshuu, ia mendapat perlindungan dari Daimyoo Moori, pemimpin partai oposisi terhadap shogun. Pada tahun 1867, ia kembali lagi ke istana. Jabatan yang ia pegang adalah *udaijin*, *dajo* - *daijin* (1874) dan ketua dewan (1889).

Ke-dua, Iwakura Tomomi (1825 - 1883). Ia adalah seorang bangsawan yang pernah dimasukkan dalam penjara pada tahun 1862 oleh orang - orang pendukung Shogun Iemochi hingga tahun 1867. Tahun 1868 menjadi seorang menteri. Pada tahun 1869, ia dikirim ke Nagato dan Satsuma untuk meminta penguasa setempat membangun negeri secara bersama - sama. Pada akhir 1871, ia memimpin misi ke Amerika Serikat dan Eropa. Karena misi ini, ia mendapat prestige yang lebih. Selama misi, ia mengamati dan meneliti penyebab ketertinggalan Jepang dari negara - negara yang ia kunjungi. Jabatan yang pernah dipegangnya adalah ketua dewan dan menteri luar negeri serta udaijin.

Tokoh - tokoh yang lain adalah Matsukata Masayoshi (1835 - 1924) dari Satsuma, Oomura Masujiro (1824 - 1869) dari Chooshuu, Fukuoka Kotei (1835 - 1919) dari Tosa, Soejima Taneomi (1828 - 1905) dari Hizen dan Yuri Kimimasa (1829 - 1909) dari han yang lain yakni fukui.

Ditinjau dari segi usia, angka rata - rata usia mereka adalah 32 tahun. Usia ini terhitung muda untuk memimpin suatu negara. Dalam usia muda, warna ambisi yang besar sangat mendominasi kepribadiannya apalagi ambisi ini terdukung oleh faktor - faktor lain yang dirintisnya sebelum restorasi yakni sebagai penasihat daimyoo, sebagai agen diplomasi atau sebagai organisator kesatuan militer. Umumnya mereka memiliki karir dalam bidang militer. Tidak mengherankan bila ambisi ini sebenarnya juga berasal dari kehidupan sebagai anggota militer.

Ditinjau dari segi pendidikan, mereka semuanya mengenyam pendidikan. Pendidikan merupakan suatu faktor yang penting untuk menjadi pemimpin karena melalui pendidikan orang menjadi mampu berpikir, menemukan masalah, merumuskannya dan memecahkan masalah. Sebelum jatuhnya Tokugawa, hak untuk mendapatkan pendidikan lebih banyak terdapat di kelas samurai. Mereka mendapat berbagai macam pelajaran seperti berperang, membaca, menulis, berhitung dan etika. Mereka dididik dengan disiplin militer yang keras. Mereka dilatih untuk menjadi orang yang kuat dan terlatih dalam urusan perang. Di samping itu, Tokugawa juga memberi masukan pengetahuan tentang ajaran - ajaran Konfusius yang berisi tentang kesetiaan dan dedikasinya sebagai seorang samurai. Akibat pendidikan yang diterimanya, mereka memiliki sensitivitas yang tinggi terhadap masalah - masalah nasional dan menanamkan sikap untuk mengabdikan pada penguasa yang tertinggi.

Telah disebutkan bahwa para aktor yang memainkan peranan dalam pemerintahan Meiji sebagian besar merupakan kelas samurai menengah ke bawah. Pendidikan untuk kelas ini merupakan pendidikan yang menyiapkan mereka yang tergabung dalam kelas samurai menengah ke bawah ini menduduki jabatan - jabatan klerikal atau administratif. Sebagai akibatnya, mereka sangat berperan dalam bidang administrasi nyata. Mereka sering kali memperdayakan atasan mereka karena pengetahuan praktis yang mereka



kuasai lebih banyak daripada atasan mereka.³⁸⁾ Keshahiran mereka ini penting terutama ketika pemerintahan Meiji sedang menggalakkan unifikasi dan sentralisasi kekuasaan, diantara mereka seperti Okubo mampu meujuk penguasa daerahnya untuk menyerahkan wilayahnya ke tangan kaisar. Strategi yang tepat untuk memancing penguasa daerah - daerah lain mengikuti langkah yang diambil oleh penguasa daerahnya. Kido Kooiin juga melakukan hal yang sama pada tahun 1868 terhadap penguasanya.

B. Pelaksanaan Kebijaksanaan

Antara tahun 1868 (setelah Restorasi Meiji) dan 1894, pelaksanaan kebijaksanaan diarahkan pada dua sasaran. Pertama adalah mempertegas keberadaan status Jepang sebagai bangsa yang diperhitungkan dalam dunia internasional. Sasaran ke-dua mengarah pada sarana tercapainya sasaran pertama yakni perjanjian tahun 1858 harus dapat diratifikasi. Dengan demikian, pada 25 tahun ke depan setelah Restorasi Meiji, pelaksanaan kebijaksanaan terkonsentrasi pada tujuan politik luar negeri yang masih dipenuhi oleh semangat Restorasi yakni jooi.

Adapun pelaksanaan kebijaksanaan mencakup berbagai bidang baik politik sendiri, ekonomi, sosial budaya maupun militer sebagaimana telah dibuktikan oleh Amerika, sangat berperan untuk menunjukkan kekuatan suatu bangsa ketika

³⁸⁾Robert N.Bellah, op. cit., h. 63

Jepang masih tertutup.

1. Kebijakan politik

Setelah Kaisar memegang kekuasaan, kaisar mengeluarkan Sumpah (*Gokajo no Goseimon*) yang sangat penting . Sumpah ini tidak dibuat sendiri oleh kaisar yang masih berumur 15 tahun. Konsep piagam ini dibuat oleh Yuri Kimimasa dan Fukuoka Kootei (termasuk dalam daftar tokoh pergerakan). Sebelum dikeluarkan, konsep tersebut dimodifikasi oleh Kido Kooiin hingga menghasilkan suatu piagam yang siap disahkan. Sumpah ini terdiri dari lima pasal. Kelima pasal tersebut adalah :³⁹⁾

1. Dewan - dewan musyawarah akan dibentuk secara luas dan tiap - tiap kebijaksanaan akan ditetapkan berdasarkan musyawarah;
2. golongan tinggi dan rendah harus bersatu dalam melaksanakan rencana - rencana bangsa dengan penuh gairah;
3. semua kelas akan diperbolehkan memenuhi cita-cita adil mereka dan mendapat rasa puas;
4. adat istiadat masa lalu yang tidak baik harus dihapus, dan asas - asas yang adil dan wajar haruslah menjadi dasar kebijaksanaan kita;
5. pengetahuan harus dicari di seluruh dunia agar supaya kesejahteraan kerajaan dapat ditingkatkan.

Sumpah ini dikeluarkan pada tanggal 6 April 1868 dan

³⁹⁾Ryoosuke Ishii, Sejarah Institusi Politik Jepang, (Jakarta : Gramedia, 1989), h. 127

dijadikan asas politik pemerintahan Meiji.

Dari sini jelas ditunjukkan bahwa peran dari tokoh - tokoh gerakan restorasi sebenarnya sudah ada. Pembuat piagam dari konsep hingga jadi piagam dibuat oleh orang pergerakan. Orang - orang ini merupakan orang - orang yang berpendidikan yang dipengaruhi oleh pemikiran Barat. Oleh karena itu, piagam tersebut mengandung pemahaman antara lain tentang nilai nasionalisme dan sifat terbuka terhadap dunia pendidikan. Atas dasar sumpah ini, pembaharuan dicanangkan pemerintah.

Satu langkah awal yang diambil oleh pemerintah baru ini adalah mengadakan sentralisasi dan unifikasi. Ini sangat sesuai dengan pandangan Iwakura yang memandang penting persatuan bila ingin menjadi sama dengan negara - negara dari dunia Barat. Tidak terlepas dari konteks persatuan di bawah kaisar, Edwin menyebutkan kekayaan utama dari pemerintah yang baru ini adalah penguasaannya atas kaisar yang baru berusia lima belas tahun demi persatuan bangsa.

Sentralisasi dan unifikasi pun dilaksanakan sesuai jalan pemikiran mereka. Pusat pemerintahan di Edo telah diganti namanya menjadi Tokyo, atau Ibu Kota Timur. Sementara itu, dilaksanakan pergantian status daerah - daerah feodal menjadi propinsi-propinsi di bawah pemerintah pusat. Dalam langkah ini, mereka yakni orang - orang pendukung kaisar membujuk para daimyoo dari empat han dimana orang - orangnya turut dalam pemerintahan Meiji agar mengembalikan kepada pemerintah kekaisaran wewenang

politik atas tanah dan rakyatnya. Telah disebutkan dalam bagian sebelumnya, Kido dan Okubo sendiri turun tangan membujuk bangsawannya. Karena sebelumnya mereka sudah berpengaruh di daerahnya berkat kemampuannya di bidang administrasi praktis dan militer, usaha ini mendatangkan hasil. Pada tanggal 2 Maret 1868, empat daimyoo dari Satsuma, Chooshuu, Hizen dan Tosa memohon pada tahta kerajaan untuk menerima "pengembalian tanah dan penduduknya yang merupakan fief" (*hanseki hokan*).⁴⁰ Masing - masing dari mereka adalah Mouri (daimyo dari Chooshuu), Shimazu (dari Satsuma), Nabeshima (dari Hizen) dan Yamanouchi (dari Tosa).

Suatu contoh memang sangat diperlukan apabila hendak melakukan hal yang baru. Tindakan ini diikuti oleh para daimyoo yang lain. Keberhasilan langkah ini sangat mempermudah proses unifikasi dan sentralisasi. Dalam jangka waktu hanya dua tahun yakni Agustus 1871, pemerintah baru dapat melaksanakan penghapusan han dan pembentukan propinsi - propinsi (*haihan chicken*) dengan mudah. Keputusan ini merupakan hasil diadakan pertemuan antara Kido, Inoue, Yamagata, Okubo, Saigo, Oyama, Sanjo dan Iwakura.

Langkah yang mengiringi proses tersebut di atas adalah rekonstruksi struktur administrasi yang terpusat. Pada pembahasan ini nampak bahwa para pemimpin melakukan

⁴⁰Ibid., h.130

usaha-usaha yang bersifat adaptif dan tidak melepaskan sama sekali masa lampaunya. Pikiran mereka masih dipengaruhi oleh semangat restorasi untuk berpusat pada kekuasaan kaisar sebagai senjata mensahkan tindakannya.

Pelaksanaan rekonstruksi tidak sekali jadi melainkan berkali - kali karena mereka pada prinsipnya melaksanakan politiknya ini berdasarkan unsur coba - coba dengan tidak mengabaikan kondisi - kondisi yang ada di Jepang. Diawali pada tanggal 25 Februari 1868 dibentuk tiga badan penasehat untuk tenno. Ini dipandang penting mengingat kaisar (tenno) baru berumur 15 tahun. Ketiga badan penasehat tersebut adalah (1) Sosai atau Majelis Agung, yang dikepalai oleh seorang pangeran dari keluarga tenno yang bernama Arisugawa no miya. (2) Gijo atau dewan penasehat kelas satu. Setengah dari anggotanya berasal dari kuge dan setengah lagi adalah daimyo - daimyo terkemuka. (3) Sanyo atau dewan penasehat kelas dua, terdiri dari lima orang kuge dan lima belas orang samurai. Orang - orang yang tergabung dalam gerakan restorasi umumnya menduduki jabatan di bawah sosai.⁴¹⁾ Pada tanggal 27 April 1868 diubah lagi. Sistem Dajookan (Dewan Agung) dibentuk. Sosai dan Gijo digabung menjadi satu dewan yang dinamakan Dewan Negara. Selain itu dibentuk Dewan Perwakilan golongan feodal. Kekuasaan riil ada pada Dewan Negara. Hal ini mengandung arti bahwa orang - orang yang tergabung dalam gerakan restorasi juga turut di dalamnya

⁴¹Dasuki, *op. cit.*, h. 15

karena mereka sebelumnya tergabung dalam sosai. Usaha sentralisasi memuncak dengan diadakannya penghapusan kekuasaan feodal seperti yang telah dijelaskan di atas.

Sejalan dengan keberhasilan sentralisasi, rekonstruksi dilakukan lagi. Perubahan terjadi pada tahun 1871. Dajookan diubah menjadi tiga dewan, yakni Dewan Utama (se-in), Dewan Kiri (sa-in) dan Dewan Kanan (u-in).⁴² Dewan Utama membawahi delapan departemen yakni kemasyarakatan, keuangan, militer, kehakiman, istana kaisar, luar negeri, pembangunan umum, pendidikan, agama dan dalam negeri. Dalam Dewan Utama terdapat tempat kaisar mengendalikan masalah - masalah kenegaraan dan merupakan pusat kekuasaan politik masa itu. Pejabat - pejabat pentingnya adalah dajodaiin (perdana menteri), nagon (para mentri yang dirincikan ke dalam menteri kiri (sadaiin) dan menteri kanan (udaiin), dan sangi (penasehat). Dewan kiri mengurus tentang perundangan tetapi bukan memutuskan melainkan hanya bagian mengajukan saran - saran tentang perundang - undangan kepada Dewan Utama. Sementara u-in merupakan badan koordinasi tempat musyawarah para wakil - wakil departemen yang membahas masalah administrasi dan kebijaksanaan. Keputusan tetap di tangan se - in atau Dewan Utama. Struktur ini berlangsung sampai tahun 1885.

Adapun posisi - posisi penting di Dewan Utama ini

⁴²Ryoosuke Ishii, op. cit., h. 132

tidak lain adalah para tokoh pergerakan restorasi, seperti Sanjo Sanetomi menjadi dajodaijin (perdana menteri) setelah terjadi perubahan dalam tubuh dajokan; Okubo menjadi menteri dalam negeri. Di samping itu, di antara mereka ada yang menjabat sebagai sangi, seperti Okuma Shigenobu.

Pada tahun 1885, Dajookan dihapuskan dan wewenang-nya dialihkan ke kabinet menurut model Eropa. Kabinet baru ini merupakan sebuah badan pembuat keputusan yang kolegiel dan terdiri dari seorang perdana menteri, menteri luar negeri, dalam negeri, keuangan, angkatan darat, angkatan laut, kehakiman, pendidikan, pertanian, perdagangan dan perhubungan.⁴³⁾ Pada tahun 1888, kabinet ini disertai oleh Dewan Pertimbangan Agung. DPA ini diketuai oleh Ito sendiri. Pelaksanaan penghapusan Dajookan, pembentukan kabinet dan DPA ini merupakan hasil karya Ito Hirobumi yang telah memiliki pengetahuan luas tentang pemerintahan dan konstitusi karena kesempatan belajar di luar negeri yang diperolehnya dari rekomendasi Iwakura.

Rekonstruksi kelembagaan ini diiringi pula dengan upaya membuat Undang - undang Dasar. Upaya ini merupakan tanggapan pemerintah terhadap reaksi dari kelompok oposisi sekaligus janji pemerintah yang terungkap dalam Dekrit kaisar pada tahun 1881. Iwakura yang pada waktu ini menjabat sebagai udaijin atau menteri kanan telah membuat sejumlah asas umum dan uraian yang mendukung konstitusi

⁴³Ibid., h. 148

monarkhi. Guna merealisasikan, ia memberi rekomendasi pada Ito untuk belajar dengan R. von Gneist dan A. Mosse dari Jerman, dan dengan L. von. Stein dari Austria.⁴⁴⁾

Sekembalinya dari Eropa, tokoh - tokoh pergerakan yang berpengaruh seperti Iwakura dan Okuma telah wafat. Ia menjadi satu-satunya tokoh yang berpengaruh dan berkompeten untuk melunasi janji yang telah terungkap dalam Dekrit Kaisar 1881. Ia meneruskan karya Iwakura pada akhir tahun 1885. Dengan bekal ilmunya, ia banyak melakukan persiapan ke arah persiapan untuk menyusun konstitusi dan undang - undang pelengkapanya secara diam - diam. Tindakan ini jelas dapat ia lakukan karena ia adalah orang paling berpengaruh dalam pemerintahan. Hasilnya berupa konstitusi yang diundangkan pada tanggal 11 Februari 1889. Undang - undang Dasar ini merupakan suatu konstitusi monarkhi.

Konstitusi monarkhi berlaku pada tanggal 29 Nopember 1890 dan bersamaan dengan hari pembukaan Sidang Perdana Parlemen Kekaisaran. Konstitusi ini terdiri dari 76 pasal dan terbagi dalam tujuh bab. Menurut konstitusi ini, kekaisaran Jepang harus diperintah oleh kaisar. Cabang - cabang pemerintahan dipimpin oleh kaisar sendiri. Kaisar juga diberi kekuasaan yang besar untuk mengeluarkan peraturan - peraturan pelengkap yang berdiri sendiri. Parlemen terdiri dari dua kamar yakni Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Bangsawan yang merupakan anggota keluarga

⁴⁴Ibid., h. 147-148

kaisar dan anggota - anggota yang resmi ditunjuk. Pimpinan tertinggi angkatan darat dan laut berada di tangan kaisar sesuai dengan tradisi sebelumnya dan berada di luar kementerian lain sehingga dapat mengungkapkan pendapat langsung ke kaisar. Praktek inilah yang membawa Jepang ke arah kediktatoran militer sebagai dampak dari sikap setia dan ekspansionisme sebagai dampak dari keberaniannya dan harga diri.

Tetap berkaitan dengan tujuan ratifikasi perjanjian, Pemerintah Meiji ini mengirim utusan ke Eropa dan Amerika . Utusan ini dipimpin oleh Iwakura. Orang - orang pergerakan restorasi yang tergabung dalam misi ini adalah Kido, Okubo dan Ito. Tujuan utama mereka adalah mengajukan permohonan ratifikasi perjanjian. Namun demikian, tujuan utama ini diikuti pula oleh tujuan yang lain yakni usaha mengetahui letak keberhasilan negara - negara di Barat. Hal ini dapat dilihat dari ucapan Ito ketika berkunjung ke California pada tahun 1872. Ito mengatakan bahwa:

"Kami datang untuk mempelajari kekuatan anda, bahwa, dengan mengambil sebanyak - banyaknya kebiasaan anda yang lebih baik, kami mungkin kemudian akan memperkuat diri kami sendiri... Kami akan bekerja untuk menempatkan Jepang sederajat, pada masa yang akan datang, dengan negara - negara yang berperadapan modern yang sekarang membimbing kami."⁴⁵⁾

Selama rombongan Iwakura pergi, pemerintahan tetap berjalan di bawah pengaruh tokoh pergerakan. Selain Sanjo,

⁴⁵⁾ Ketut Surajaya, *op.cit.*, h. 33

ada Saigo, Okuma dan Eto yang juga berpengaruh dalam pemerintahan sementara itu. Pemerintahan ini pernah mengirimkan armadanya ke Korea dengan meniru cara - cara Perry. Maksud yang diajukan kepada pemerintah Korea adalah maksud dagang. Namun, maksud ini ditolak. Rupanya maksud utama mereka yang terdapat dibalik maksud dagang yakni ingin menjadikan Korea sebagai jajahannya terutama untuk suplai beras ke Jepang, telah tercium oleh pemerintah Korea. Pemerintah Jepang ini pun kemudian ingin mengirimkan armadanya dengan kekuatan yang lebih besar lagi mengingat penolakan ini dianggap sebagai penghinaan. Pemerintah menunjuk Saigo Takamori untuk memimpin armada ini.

Ketika keputusan ini sudah diambil, misi yang dipimpin oleh Iwakura datang. Mereka yang telah membawa pengalaman yang didapat selama melakukan misi ini menentang keras keputusan ini. Menurut Iwakura dan anggota misi yang lain, Jepang harus terlebih dahulu membenahi urusan di dalam negeri sebelum memperluas wilayah ke luar negeri. Pembenahan dalam negeri dengan jalan membangun suatu pemerintahan yang kuat dan membangun ekonomi nasional secepat mungkin untuk bersaing dengan kekuatan Barat harus diprioritaskan. Perdebatan masalah ini membuat perpecahan di tubuh pemerintahan sendiri. Kelompok Iwakura didukung oleh Okubo Toshimichi, Kido Koin dan Ito Hirobumi. Sedangkan kelompok Saigo didukung oleh Sanjo, Itagaki, Eto, Soejima (1828 - 1905) dari Hizen, Yamagata Aritomo, Oki Takato (1832 - 1899) dari Hizen dan Okuma Shigenobu.

Argumentasi yang kuat dari kelompok Iwakura membawa kemenangan baginya atas kelompok Saigo.

Karena kecewa, Saigo, Itagaki dan Eto mengundurkan diri dari pemerintahan. Mereka pun kembali ke daerah masing - masing; Saigo kembali ke tanah kelahirannya yakni Kagoshima, Itagaki Taisuke kembali ke Tosa dan Eto ke Hizen. Pengunduran diri mereka tidak berarti bahwa mereka sudah lepas sama sekali dari urusan politik. Pengaruh mereka tetap mereka gunakan yakni dengan memperjuangkannya lewat daerahnya masing - masing dengan caranya masing - masing. Mengenai perjuangan mereka akan dibahas dalam bagian lain dalam sub-bab ini.

2. Kebijakan ekonomi

Warisan bidang ekonomi dari Tokugawa yang diterima oleh pemerintahan Meiji dapat dikatakan buruk. Ditinjau dari segi moneter, Tokugawa menganut sistem ganda. Feodalismenya mengabaikan pengawasan terhadap sistem moneter yang ada ini. Selain itu, hak pembuatan uang kertas dimiliki oleh pemerintah daerah. Permainan tidak sehat pun sering terjadi. Sesudah Jepang dibuka, kehidupan moneter Jepang semakin diperburuk dengan adanya kasus perbedaan nilai emas terhadap perak yang membuat banyak emas mengalir ke luar. Akibatnya, terjadi kekacauan moneter terutama sangat jelas diderita oleh keuangan pemerintah sendiri yang selalu defisit.

Perbedaan antara situasi nyata dan cita - cita ekonomi sejahtera mendorong pemerintah Meiji untuk mengambil langkah "mengobati penyakit" yang diturunkan

mengambil langkah "mengobati penyakit" yang diturunkan dari Tokugawa. Pemerintah Meiji mengeluarkan kebijaksanaan pembaharuan yang mengarah pada cita - cita ekonomi sejahtera. Pembaharuan ekonomi yang dilaksanakan mencakup keuangannya, industri, perdagangan dan pembangunan prasarananya.

Sebagaimana bidang politik melakukan sentralisasi, pembaharuan ekonomi pun demikian. Pada tahun 1871 dan 1872, Ito dan Okuma melaksanakan pembaharuan keuangan. Mereka mengeluarkan satuan dasar uang baru yang berlaku di seluruh negara. Satuan dasar uang baru tersebut adalah yen. Pembuatan uang sepenuhnya dimonopoli oleh pemerintah pusat. Standar yen ini kira - kira berharga setengah dollar Amerika Serikat.⁴⁶⁾

Dalam usaha mengatasi masalah keuangan pemerintah, jalan yang diambil adalah pembaharuan sistem perpajakan sebagai sumber keuangan pemerintah pertama. Menjelang tahun 1873, Ordonansi Perubahan Pajak Tanah (Chiso Kaisei Ho) diundangkan. Ordonansi ini menentukan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Pembayaran dilakukan dengan uang tunai sebesar tiga persen dari nilai tanah. Nilai tanah diperoleh dari hasil penyelidikan terhadap tanah yang kemudian ditetapkan nilainya dalam bentuk uang. Pajak tiga persen tersebut ditambah dengan pajak desa hingga menjadi kurang lebih 34 persen. Jumlah ini sangat memberatkan

⁴⁶Edwin O. Reischauer, Manusia Jepang, (Jakarta : Sinar Harapan, 1982), h.102

petani. Ketidakpuasan muncul dalam wujud pemberontakan petani 1876 sehingga pemerintah menurunkan tingkat pajak hingga 2,5 persen. Dari penerapan pembaharuan sistem perpajakan ini, pemerintah dapat mengumpulkan biaya yang stabil untuk pembangunan industri dan kekuatan militer.⁴⁷⁾

Pemerintah Meiji juga mengatur pemilikan tanah. Ini dilakukan untuk mengimbangi sistem perpajakan baru yang lebih bersifat individual. Pemerintah memperluas sistem sertifikat pemilikan tanah yang satu tahun sebelumnya telah dipergunakan. Sertifikat ini menunjukkan kemajuan bagi Jepang karena di dalam penggunaan sertifikat berarti ada pengakuan terhadap hak - hak kekayaan individu.

Guna memperkuat ekonominya, pemerintah Meiji memutuskan untuk dilaksanakan industrialisasi. Pada awalnya, industrialisasi dilakukan oleh pemerintah mengingat belum banyak pihak swasta yang mampu baik dari segi keuangan maupun manusianya. Pemerintah mengharapkan industrialisasi ini dapat menghasilkan barang - barang ekspor sehingga menambah devisa sekaligus menghasilkan barang - barang yang dapat memperkuat militernya.

Industri pertama yang dikembangkan adalah industri tekstil. Produksi sutera yang sudah sejak masa Tokugawa merupakan salah satu komoditi menjadi sasaran pertama untuk ditingkatkan dengan menggunakan tenaga mekanis untuk pemintalan. Tahun 1873, usaha ini dijadikan usaha patungan dengan swasta. Di masa ini, salah seorang pejabat

⁴⁷Sayidiman, op.cit., h. 31

pemerintah bernama Godai Tomoatsu (1835 - 1885) dari Satsuma yang pernah dikirim ke Inggris pada tahun 1865, mengundurkan diri agar bisa terjun melakukan usaha sebagai orang swasta. Sebagai orang swasta, ia tetap ambil bagian dalam pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan statusnya yang baru, ia mengajak para pedagang tradisional untuk menarik manfaat dari bentuk perusahaan baru ini. Hasilnya nampak pada pertengahan tahun 1870-an yakni semakin banyak orang yang percaya akan baiknya saham patungan ini. Tahun 1885 terdapat 1.279 perusahaan dengan modal seluruhnya 50 juta yen.⁴⁸⁾ Sementara itu, pemerintah Jepang juga tetap berpartisipasi mengimbangi ekonomi baru yang dinamik dengan jalan mengimpor mesin - mesin dari negara - negara Barat, mendatangkan teknisi - teknisi asing, membuka usaha pertambangan, pabrik tekstil, logam, gelas dan pembuatan kapal. Usaha ini menghabiskan uang sebanyak 350.000 yen ditambah 100.000 yen untuk melakukan percobaan dalam produksi gelondong yang mendukung proses pemintalan.

Mengenai biaya pelaksanaan, pemerintah Meiji dapat dikatakan mampu menunjukkan kepercayaan diri yang kuat. Dalam kekacauan ekonomi yang diwarisinya, mereka tetap berusaha untuk mandiri, seminimal mungkin melibatkan orang asing dalam urusan modal. Sepanjang kurang lebih seperempat abad setelah restorasi, pemerintah Meiji hanya

⁴⁸⁾Yoshihara Kunio, Perkembangan Ekonomi Jepang, (Jakarta : Gramedia dan Yayasan Obor Indonesia, 1983), h.6

mengambil jalan meminjam dari luar negeri sebesar lima juta yen dalam tahun 1870. Dana pinjaman ini digunakan untuk membangun jalan kereta api yang menghubungkan Tokyo dan pelabuhannya di Yokohama. Jadi, dana tersebut tidak secara langsung digunakan untuk proyek industri melainkan untuk pembangunan prasarana.

Pembangunan prasarana merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting demi kelancaran industrialisasi dan perdagangan. Proyek ini selesai pada tahun 1872. Proyek ini terus berlanjut dengan menghubungkan Tokyo dan Kobe yang selesai pada tahun 1889. Angkutan laut dimodernisasi dengan cara mengimpor kapal - kapal uap dari Barat. Dalam dunia pelayaran ini pemerintah tidak secara langsung memiliki perusahaan pelayaran ini tetapi memberi subsidi yang besar kepada Iwasaki Yataro agar membangun armada kapal niaga yang modern guna melayani volume angkatan laut yang terus meningkat. Modernisasi jaringan komunikasi juga dilaksanakan. Periode 1868 - 1885, Jepang telah memiliki 5.000 kantor pos yang melayani 100 juta kiriman per-tahun dan jaringan telegrap telah melayani kiriman swasta sejumlah 300 juta per-tahun.

Dengan adanya kegiatan pembangunan ekonomi secara besar - besaran anggaran belanja meningkat. Peningkatan terus terjadi dengan adanya pemberontakan yang terjadi pada tahun 1870-an. Akibatnya, anggaran belanja pemerintah selalu lebih besar daripada penerimaannya.

Kesulitan ditambah dengan adanya penemuan perak secara besar - besaran di Amerika. Harga perak di Jepang

pun turun. Perbandingannya terhadap emas 20 : 1. Konvertibilitas uang kertas juga kacau sehingga mengganggu kestabilan politik.

Pemerintah mencoba mengatasi. Tokoh yang utama dalam penyelesaian masalah ini adalah Matsukata Masayoshi (1835 - 1924), orang Satsuma yang menjabat menteri keuangan tahun 1881 - 1885. Dengan cerdik ia menarik uang kertas yang beredar melalui pembuatan surplus anggaran belanja negara dan menimbulkan "*deflasi Matsukata*". Wewenang sebagai menteri keuangan memungkinkannya melakukan pengeluaran pemerintah, menciptakan pajak - pajak baru dan menebus uang kertas berdasarkan surplus yang terjadi. Kenyataan membuktikan bahwa ia mampu memulihkan kembali konvertibilitas uang kertas dan Bank of Japan menjadi satu satunya bank yang berhak mengeluarkan uang kertas.⁴⁹⁾

Berbeda dengan masa Tokugawa yang membatasi kegiatan perdagangan, pemerintah masa Meiji mengambil jalan membuka diri seluas - luasnya terhadap luar negeri. Tindakan ini sesuai dengan isi piagam yang menyebutkan upaya mencari pengetahuan ke segala penjuru dunia. Tidak disebutkan secara khusus pengetahuan apa. Ini mengandung arti pula bahwa perdagangan termasuk di dalamnya. Di samping itu, perdagangan yang terbuka sekaligus dapat dijadikan pemasukan bagi Jepang. Angka indeks ekspor impor menyebutkan adanya peningkatan kuantitas ekspor meski

⁴⁹Ibid., h. 4

disertai pula oleh kuantitas impor. Tahun 1873-1877, ekspor mencapai 1,4 dan impor 1,6; tahun 1878-1882, ekspornya 2,0 dan impor 2,4; tahun 1888-1892, ekspor mencapai 4,5 dan impor, 4,9.⁵⁰⁾ Terlepas dari besar impor yang lebih tinggi dari ekspor, angka - angka ini menunjukkan bahwa perdagangan memang terus meningkat.

3. Kebijakan sosial budaya

Reformasi atau pembaharuan besar lainnya yang dilakukan pemerintah Meiji adalah reformasi sosial budaya. Pada saat ini, Okubo dan Kido menjadi tokoh sentral di dalam pemerintahan. Tidak lama setelah pengunduran diri Saigo, pemerintah melakukan tugas yang paling sulit berkenaan dengan sumpah yang didekritkan oleh kaisar yang menyebutkan bahwa kelas tinggi dan rendah akan bersatu. Perwujudan sumpah ini dilakukan pada tahun 1873. Wajib militer tidak hanya khusus bagi kalangan samurai tapi berlaku untuk umum. Dalam tahun 1876, golongan samurai dilarang memakai pedangnya dan tanda pangkat kehormatannya. Gaji samurai juga dikurangi. Sebelum restorasi, samurai mendapat tunjangan beras yang bernilai 1.000 gantang. Setelah restorasi, dikurangi hingga tersisa 400 gantang.⁵¹⁾ Pada tahun 1876, pendapatan para samurai ini seluruhnya diubah menjadi pembayaran uang kas yang sangat kecil jumlahnya

⁵⁰Ibid., h. 52

⁵¹G.B. Sansom, op.cit., h.344

atau obligasi pemerintah.⁵²⁾ Pendapatan akhir yang diterima hanya senilai 150 gantang. Dalam jangka waktu yang singkat yakni sembilan tahun, golongan samurai mengalami pencabutan semua hak istimewa mereka. Dengan tindakan ini, Jepang mengalami perubahan besar dalam masyarakatnya. Kekhasan samurai dengan adanya penghapusan hak - haknya membuat golongan ini tidak lagi memiliki keistimewaan.

Masih tetap berasaskan pada piagam Sumpah, pemerintahan Meiji melakukan pembangunan dunia pendidikan. Tahun 1871, dibentuk kementerian pengajaran guna mengatur proses pembangunan dunia pendidikan. Kementerian ini mengeluarkan wajib belajar 4 tahun bagi seluruh rakyat Jepang. Tidak sekedar perintah saja, pemerintah turut aktif di dalamnya. Sekolah - sekolah dibangun dari sekolah dasar sampai universitas. Untuk tiap 600 penduduk dibangun satu sekolah rendah.⁵³⁾ Akibat dari kebijakan pemerintah bidang pendidikan yang mengumumkan sistem pendidikan baru (5 September 1872). Sistem baru ini tidak mengenal diskriminasi. Statistik tahun 1873 menyebutkan adanya 13.000 sekolah dasar dengan jumlah murid 600 orang setiap sekolah. Program pembangunan ini diharapkan menjadi pendukung tercapainya tujuan pendidikan di seluruh rakyat Jepang.

⁵²Edwin O. Reischauer, *op.cit.*, h. 101

⁵³Nio Joe Lan, *Jepang Sepanjang Masa*, (Jakarta : Gramedia. 1962), h. 46

Sebagaimana tujuannya yakni agar dipandang sama dengan Barat, sistem pendidikannya juga dibuat dapat masukan dari sistem pendidikan Barat. Selain pendidikan rendah 4 tahun, pemerintah juga mengadakan sekolah lanjutan selama lima tahun. Setelah itu, pemerintah juga menyediakan sekolah tinggi bagi para lulusan sekolah menengah. Di sekolah tinggi inilah, mereka dapat mengambil spesialisasi ilmu sesuai yang diinginkan dan kemampuannya.

Peran aktif pemerintah tidak hanya mengeluarkan sistem wajib belajar dan pembangunan sekolah. Penyediaan buku - buku pelajaran baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dilakukan. Tindakan ini dilakukan untuk lebih melengkapi dari sudut materi pelajaran yang berhubungan langsung dengan ilmu pengetahuannya. Untuk memenuhi penyediaan sumber daya manusia di dunia pendidikan dan pembangunan lainnya, pemerintah mengirim para pelajar untuk belajar di luar negeri. Peran aktif dari pemerintah juga meliputi pengawasan pusat terhadap jalannya sistem pendidikan.

Pembangunan dunia pendidikan sangat mendukung keberhasilan program - program pemerintah yang lain karena perkembangan dunia ini mampu menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas yang sangat dibutuhkan pemerintah untuk menjadi sama dengan Barat.

Sejalan dengan perkembangan pendidikan, dunia persuratkabaran pun berkembang. Harian Jepang pertama adalah Mainichi yang didirikan pada tahun 1872 di Yokohama. Harian terbit ini diikuti pula oleh munculnya

suratkabar yang lain antara lain Nichi-nichi Shimbun, Yomiuri Shimbun tahun 1874 dan Asahi Shimbun tahun 1879. Hadirnya surat kabar ini semakin mengembangkan dunia bacaan yang secara tidak langsung juga menambah informasi pengetahuan bagi seluruh rakyat Jepang karena menyediakan informasi tentang kejadian - kejadian aktual. Peran ini sangat penting terutama bagi para cendekiawan dan para tokoh pergerakan untuk menyebarluaskan gagasannya.

.4 Reaksi terhadap kebijaksanaan pemerintah

Banyak tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Meiji mengundang tanggapan dari pihak lain. Untuk tanggapan positif tidak dibahas karena ini tidak menjadi masalah bagi pemerintah tersebut. Tanggapan negatif datang dari kalangan samurai sendiri. Eto yang pulang ke daerahnya memimpin pemberontakan terhadap pemerintah pada tahun 1874. Pemberontakan ini berhasil ditumpas. Tanggapan negatif terbesar adalah pemberontakan yang dipimpin oleh Saigo (1877). Rupanya Saigo yang mengundurkan diri karena masalah Korea dan pulang ke daerahnya tetap memperhatikan tindakan - tindakan pemerintah. Setelah menyusun kekuatan selama tiga tahun dengan cara mendirikan sekolah militer di daerahnya yang sebagian besar muridnya adalah orang - orang Satsuma, ia memimpin pemberontakan Satsuma dengan kekuatan 40.000 orang. Pemberontakan ini disebabkan oleh pembentukan angkatan perang nasional atas dasar wajib militer umum, pembayaran pensiun yang tidak memuaskan dan keharusan menanggalkan lambang - lambang

kesamurain.⁵⁴⁾ Dengan kekuatan 30.000 orang, ia memberontak. Pemerintah memakan waktu cukup lama dalam usaha menghentikan pemberontakan. Selama kurang lebih enam bulan, pemerintah yang berkekuatan 60.000 orang hasil wajib militer umum yang dilatih oleh orang Eropa mampu menghentikan pemberontakan. Kemenangan ini merupakan suatu keberhasilan yang membanggakan karena personil wajib militer umum yang dikirimkan bukan seluruhnya samurai. Sedangkan orang - orang Satsuma yang memberontak merupakan orang - orang eks samurai yang tidak puas akan kebijaksanaan pemerintah. Kemampuan memadamkan pemberontakan ini mendatangkan keuntungan bagi pemerintah karena sekurang - kurangnya potensi kekuatan militer pemerintah Meiji ini memberi tanda peringatan bagi mereka yang ingin melawan pemerintah.

Sebelum adanya pemberontakan - pemberontakan tersebut, telah ada sikap kritis terhadap langkah - langkah yang diambil oleh pemerintah yang semakin didominasi oleh orang - orang Chooshuu dan Satsuma. Satu sikap ditunjukkan oleh orang - orang yang kalah dalam masalah Korea dan mengundurkan diri dari pemerintah yakni dengan mengajukan pernyataan yang menuntut pemerintah untuk membentuk sebuah majelis pilihan rakyat. Pernyataan ini disampaikan oleh Itagaki (seorang menteri yang progresif), Goto Shojiro, Soejima Taneomi dan Eto Shimpei. Mereka membentuk *Aikoku Kootoo*

⁵⁴Dasuki, op.cit., h.18

(Partai Umum Pencinta Tanah Air) di Tokyo dan hanya bertahan dua bulan.

Meskipun hanya sebentar, petisi ini sangat mempengaruhi stabilitas pemerintahan Meiji. Polemik ini menimbulkan golongan pro dan kontra. Tidak hanya di kalangan pemerintahan saja, tetapi juga ramai dibicarakan dalam masyarakat. Hal ini terjadi karena adanya faktor pendukung bidang persuratkabaran yang telah meluas. Isi petisi ini dimuat di surat kabar yang bernama *Nissin Shinjisi* (Berita Benar Harian) secara menyolok.⁵⁵ Surat kabar ini tersebar luas sehingga petisi yang termuat pun terbaca oleh masyarakat Jepang. Akibat dari dimuatnya isi petisi ini terjadi perubahan di bidang pers yakni dari "surat kabar pencerahan" menjadi "surat kabar yang berhaluan politik". Ada surat kabar yang mendukung tuntutan dibentuknya parlemen dan ada yang menolak tuntutan tersebut. Hal ini mendorong pemerintah mengambil tindakan preventif demi tercapainya stabilitas pemerintahannya. Pada tanggal 28 Juni 1875, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pers (*Shinbunshi jorei*) yang mengatur pemuatan artikel di surat kabar.⁵⁶ Polemik seputar petisi yang menuntut pembentukan parlemen pun menjadi ramai.

Setelah bubar dan Itagaki kembali ke Tosa, ia tetap

⁵⁵I Ketut Surajaya, *op.cit.*, h. 58

⁵⁶Ibid.

melanjutkan perjuangannya dengan membentuk perkumpulan Baru yang bernama *Risshisha* (masyarakat berdikari).⁵⁷⁾ Pada mulanya perkumpulan ini bergerak di bidang ekonomi. Namun setelah melihat keadaan para samurai yang untuk hidup subsisten saja sulit, perkumpulan ini mulai bergerak di bidang politik. Kegiatan - kegiatan penting dari perkumpulan ini adalah (1) mendirikan sekolah - sekolah untuk golongan "bekas samurai" (*gakushu*). (2) Mendirikan perusahaan - perusahaan yang menjamin penghidupan mereka. (3) Mengadakan pidato - pidato serta diskusi secara terbuka. (4) Membentuk badan - badan penyelidikan hukum.⁵⁸⁾ Pada tahun 1877, *Risshisha* mengajukan petisi kepada pemerintah untuk membuka parlemen. Latar belakang pengajuan petisi ini adalah kegagalan pemberontakan yang dilakukan oleh Saigo. Kaitannya terletak pada persamaan para pendukungnya yakni bekas samurai. Itagaki harus melindungi orang - orang bekas samurai ini dari tindakan pemerintah yang menjadikan para samurai sebagai objek kebijaksanaannya. Tapi Itagaki memang cerdas. Ia tidak mau bernasib sama dengan Saigo. Ia tidak melakukan dengan cara kekerasan. Cara pengajuan petisi yang sebelumnya pernah dilakukan dan berhasil menggoncangkan pemerintahan dilakukan lagi. Selain mengajukan tuntutan agar dibentuk parlemen, petisi ini juga menyertakan kegagalan -

⁵⁷Ibid., h. 59

⁵⁸Ibid., h. 60

kegagalan yang dialami oleh pemerintah. Sulit bagi orang yang telah duduk berkuasa untuk mengakui kesalahannya. Akibatnya kekacauan politik terus berlangsung. Di samping itu, Itagaki bergabung dengan organisasi - organisasi yang dipimpin oleh goonoo yang berpusat pada kekuatan petani. Fusi ini diberi nama Persekutuan Penuntut Parlemen (Maret 1880). Keputusan yang penting adalah akan diajukannya "Surat Petisi" yang menuntut pemerintahan yang ber-Undang-undang Dasar. Ketiga tuntutan penting lain adalah pembukaan parlemen, penurunan pajak tanah dan pembaharuan kebijaksanaan diplomatik. Organisasi politik ini terus berkembang luas dengan ditandai oleh masuknya dukungan organisasi politik yang lain seperti dari Jepang Timur Laut. Kongres - kongres besar diadakan hingga hasilnya mengarah pada pembentukan partai liberal (*jiyuu-too*). Persiapan matang pun dilakukan. Hasil yang diperoleh oleh partai liberal ini adalah sebuah janji kaisar yang akan membuka parlemen 10 tahun yang akan datang.⁵⁹)

Kekacauan - kekacauan ini sebenarnya merupakan aksi balik atas kebijaksanaan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Telah disebutkan di atas bahwa pemerintah dalam jangka waktu sembilan tahun telah memaksa para samurai untuk berevolusi bidang sosial.

Dalam suasana yang kelut karena semakin meningkatnya

⁵⁹Ibid., h. 70-73



"Gerakan Demokrasi" dari partai liberal, ~~perselisihan~~ juga terjadi di kalangan pemerintah sendiri. Kelompok pertama adalah kelompok Sat-Choo yang berada di bawah pengaruh Ito Hirobumi. Kelompok ini merupakan kelompok dominan di dalam pemerintahan. Kelompok kedua adalah orang - orang di luar Sat-Choo yang dipimpin oleh Okuma Shigenobu. Kelompok ketiga adalah kelompok yang berada di bawah pengaruh Yamagata yang cenderung bersifat ekstrim dan otoriter. Pertentangan yang sengit terutama antara kelompok Ito dan Okuma. Mereka memiliki persamaan paham dalam hal pemerintahan yang berparlemen dan ber Undang-undang Dasar dan setuju dengan masuknya unsur - unsur partai politik. Tapi mereka memiliki perbedaan pandangan tentang bentuk parlemen negara mana yang akan dicontoh dan diterapkan di Jepang. Okuma mengajukan sistem parlemen Inggris. Sedangkan Ito ingin menerapkan sistem Prusia. Krisis ini semakin ramai oleh adanya desas - desus tentang kasus pelelangan barang - barang milik Komisi Kolonisasi Hokkaido. Kasus ini dimuat dalam surat - surat kabar. Akibatnya, pemerintah dipandang telah berbuat semena - mena. Padahal, tindakan ini diambil dengan alasan usaha membendung bahaya yang akan datang dari Rusia. Ini sesuai dengan semboyan pemerintah yang ingin menjadikan negaranya kuat secara militer. Sementara desas desus yang lain menunjuk Okuma sebagai biang keladi perpecahan dalam pemerintahan. Usul Okuma tetap masuk menjadi bahan pertimbangan selanjutnya dalam pemerintah ketika sedang mengadakan pertemuan yang membicarakan tentang pembentukan

Undang - undang Dasar dan parlemen. Pertemuan ini diadakan di tempat kediaman Kaisar, yang dihadiri oleh Menteri Negara Sanjo Sanetomi, Arisugawa Taruhito (sadaijin), Iwakura (udaijin) dan anggota - anggota Dewan Atas yang terdiri dari Terajima Munenori (1833 - 1893, dari Satsuma), Yamagata Aritomo, Ito Hirobumi, Kuroda Kiyotaka (1840 - 1900, dari Satsuma), Saigo Tsugumichi (1843 - 1902, saudara dari Saigo Takamori), Inoue Kaoru dan Yamada Akiyoshi, sedangkan Okuma tidak diajak rapat. Hasil rapatnya adalah pemecatan Okuma yang dikenal dengan nama Kudeta Meiji 14 dan penangguhan masalah pelelangan. Keputusan lain yang penting adalah dalam waktu sepuluh tahun yang akan datang akan dibentuk parlemen. Tanggal 12 Oktober 1881, kaisar memproklamasikan dekrit mengenai pembentukan parlemen tersebut.

Para aktor yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan memang tidak terlepas dari penggunaan kebebasan yang dimilikinya demi tercapai tujuan - tujuan mereka.

Tidak hanya cara bersih tapi cara kotor pun diambilnya. Pergerakan partai liberal yang tak kunjung padam meski kaisar telah mengeluarkan dekritnya tanggal 12 Oktober 1881, mendorong pemerintah untuk mengambil jalan kotor. Pemerintah dengan diam - diam melakukan penyusapan dan penyogokan terhadap tokoh - tokoh pergerakan ini. Ito Hirobumi sebagai orang pemerintahan menyusap Itagaki Taisuke dengan sejumlah dana untuk mengadakan tour ke Eropa. Jalan yang diambil sangat tepat dengan kondisi

sulit yang ada di Jepang masa itu akibat adanya "*deflasi Matsukata*".⁶⁰⁾

Dengan adanya pembangunan ekonomi, militerisasi Jepang melalui refomasi sosial dan industri yang mendukungnya dan pengadaan konstitusi ini, berarti Jepang telah memenuhi tujuan yang diprioritaskan ketika Misi Iwakura kembali yakni melakukan konsolidasi ke dalam.

5. Peninjauan kembali perjanjian

Peninjauan kembali perjanjian merupakan tujuan dari pembaharuan yang dilakukan oleh pemerintahan Meiji. Tujuan ini penting karena menyangkut persoalan kehidupan Jepang sebagai bangsa. Isi dari perjanjian dipandang pemerintahan Meiji sangat tidak imbang dan lebih banyak merugikan bangsa Jepang. Apabila tidak diratifikasi, bangsa - bangsa Barat akan banyak campur tangan pemerintahan di Jepang. Selanjutnya, kelangsungan hidup bangsa Jepang tidak akan dipandang lagi. Pembahasan berikut ini menjelaskan tentang rentetan upaya peninjauan kembali perjanjian yang merupakan tujuan selama 25 tahun pertama pemerintahan Meiji.

Upaya pertama dilakukan dengan cara mengirimkan misi ke Eropa dan Amerika untuk mengajukan permohonan ratifikasi. Ketua misi ini adalah Iwakura. Di Washington, misi ini menegaskan tujuan mereka kepada Presiden Grant:

Kami mengharapkan dan bermaksud meninjau kembali dan mengadakan perbaikan - perbaikan perjanjian - perjanjian, sehingga kami dapat berdiri di atas landasan yang sama dengan negara - negara yang termaju di

⁶⁰*Ibid.*, h. 81-84

dunia... .61)

Namun misi ini gagal mendapat persetujuan.

Sepanjang pembaharuan berjalan guna mendapat pengakuan dari Barat, upaya melalui jalan diplomasi juga tetap dilakukan. Pada tahun 1881, Inoue Kaoru sebagai menteri luar negeri memulai perundingan - perundingan dengan para diplomat - diplomat Barat di Jepang. Pada tahun 1886, suatu konperensi dari perwakilan asing dilangsungkan di Tokyo guna mempertimbangkan suatu konsep yang telah disiapkan oleh Inoue. Inoue tidak segan - segan mengajukan semacam timbal balik bila perwakilan asing tersebut mau menyetujui peninjauan kembali perjanjian. Karena gangguan terhadap stabilitas politik meningkat, Inoue membatalkan kelanjutan konperensi dengan negara - negara asing yang mengikat perjanjian pada tanggal 18 Juli 1887; dan ia meletakkan jabatannya sebagai menteri luar negeri pada bulan September tahun yang sama.⁶²⁾

Menteri luar negeri selanjutnya adalah Okuma yang diangkat pada bulan Februari 1888. Okuma pun melanjutkan upaya ratifikasi. Tapi upayanya ini dilakukan secara diam - diam. Ia memohon agar hak ekstrateritorial dihapuskan. Seperti Inoue, ia pun menjanjikan berbagai janji seperti mendudukan sejumlah hakim asing, pemukiman dan

⁶¹Kenneth B.Pyle, Generasi Baru Zaman Meiji, (Jakarta : Gramedia, 1988), h. 133

⁶²Ibid., h. 135, 140

perdagangan. Peluang ratifikasi hampir berhasil karena perjanjian sudah disetujui antara Okuma dengan Amerika Serikat Jerman, dan Rusia; sedangkan perjanjian dengan Inggris dan Perancis hampir mencapai hasil. Tapi upayanya gagal karena ringkasan rencana ini terbongkar dengan dimuatnya artikel tentang perundingan tersebut dalam surat kabar Times di London. Para agitator pun melancarkan serangan ke Okuma sebagai ungkapan tidak setuju mereka dengan melemparkan bom ke kereta Okuma.¹⁾

Setelah perkembangan ekonomi, sosial-budaya dan politik terutama sesudah berlakunya sistem konstitusional yang baru, upaya untuk dilakukannya peninjauan kembali perjanjian dilakukan lagi. Pada masa ini, Mutsu Munemitsu sebagai menteri luar negerinya. Setelah mengadakan pembicaraan, bangsa Inggris yang terkesan oleh pembaharuan Jepang melalui modernisasi menyetujui untuk melepaskan hak - hak ekstrateritorialnya pada tahun 1899. Penandatanganan perjanjian yang telah diperbaiki terjadi pada tahun 1894. Bangsa - bangsa lain pun mengikutinya. Sejak tujuan politik luar negerinya dapat dicapai Jepang mulai menunjukkan diri sebagai bangsa yang unggul.

⁶³Ryoosuke Ishii, *op.cit.*, h. 153-154

B A B IV

K E S I M P U L A N

Gerakan pengembalian kekuasaan kaisar Meiji tidak terlepas dari kedatangan bangsa Barat ke Jepang. Penghubung antara gerakan pengembalian kekuasaan atau restorasi dengan kedatangan bangsa Barat adalah wewenang dan legitimasi yang ada pada shogun. Kedatangan bangsa Barat ke Jepang merupakan akibat dari persetujuan yang diberikan oleh shogun. Tindakan shogun ini dipandang sebagai tindakan penyelewengan karena tanpa persetujuan dari kaisar sebagai penguasa tertinggi tanah Jepang. Pandangan ini terutama datang dari para samurai wilayah daimyoo tozama yang pernah ditaklukan oleh Tokugawa dan pendukung kaisar.

Tekanan yang dilakukan oleh bangsa Barat yang terus menerus membuat shogun tidak berdaya. Shogun menandatangani perjanjian lagi setelah tahun 1854. Hal ini meningkatkan lebih tinggi lagi rasa ketidakpercayaan masyarakat terutama dari para pendukung kaisar. Rasa tidak percaya diarahkan pada kemampuan shogun sebagai pemimpin bangsa Jepang.

Selain rasa tidak percaya, kedatangan bangsa Barat memunculkan dampak yang pokok. Dampak pokok ini adalah munculnya nasionalisme atau paham kebangsaan. Keberhasilan bangsa Barat masuk ke Jepang dipandang sebagai suatu penghinaan. Selama masa isolasi, bangsa Jepang merasa bahwa bangsanya merupakan bangsa yang

unggul. Dengan adanya sikap tunduk yang ditunjukkan oleh shogun berarti bangsa Jepang lebih rendah dari bangsa Barat.

Kondisi yang tercipta setelah masuknya bangsa Barat sangat tidak menyenangkan pihak pendukung kaisar diantaranya adalah para samurai dari Satsuma, Chooshuu, Hizen dan Tosa. Merekalah yang menjadi oposisi shogun. Sebagai orang terpelajar mereka mampu membaca kondisi yang tidak menyenangkan ini. Mereka memanfaatkan kondisi ini sebagai senjata melawan shogun. Sikap tidak berdaya yang ditunjukkan shogun terhadap bangsa Barat terutama Amerika Serikat dijadikan dasar pendapat mereka bahwa shogun sudah tidak pantas lagi berkuasa. Kharisma sebagai pemersatu Jepang yang dimiliki oleh Tokugawa selama lebih dari dua abad telah luntur akibat shogun yang tidak berdaya.

Legitimasi kharisma yang luntur diikuti oleh ketidakstabilan legitimasi tradisional. Ketidakstabilan terutama nampak jelas dengan adanya sikap tidak setuju yang ditunjukkan kaisar atas sikap shogun yang mengizinkan bangsa Barat masuk ke Jepang. Gerakan pendukung kaisar menjadi meningkat. Kondisi ini membuat kedudukan shogun menjadi terjepit. Kunci dari seseorang memiliki kekuasaan adalah pengakuan (legitimasi). Apabila terjadi krisis legitimasi, kekuasaan seseorang itupun mengalami kegoyahan. Sedikit demi sedikit wewenang yang ada padanya berkurang sejalan dengan krisis legitimasi yang ada

padanya. Titik puncak ketidakberdayaan shogun ditandai dengan pengembalian kekuasaan ke tangan kaisar pada tahun 1867. Dengan adanya peristiwa ini, pintu terbuka bagi pihak yang membenci pemerintahan shogunat yakni para daimyoo tozama yang terdiri dari Satsuma, Chooshuu, Hizen dan Tosa yang mendukung kekuasaan kembali ke tangan kaisar. Cita - cita mereka yakni mengembalikan kekuasaan ke tangan kaisar tercapai pada tanggal 3 Januari 1868.

Setelah slogan sonno (muliakan kaisar) tercapai pada tahun 1868, sasaran pemerintahan Meiji adalah jooi (usir bar-bar). Sasaran inilah yang menjadi arah dalam berbagai kebijaksanaan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Meiji. Karena kaisar yang waktu itu berumur lima belas tahun, pemerintahan secara nyata di tangan para pendukungnya dengan tetap menggunakan atas nama kaisar. Pemerintahan ini didominasi oleh para samurai muda yang berasal dari Satsuma, Chooshuu, Hizen dan Tosa.

Keberhasilan pemerintahan suatu negara sangat tergantung dari para aktornya. Masa Meiji, pemerintahan didominasi oleh samurai. Orang di luar samurai yang berpengaruh dalam pemerintahan datang dari kelas bangsawan istana. Hal ini menunjukkan bahwa orang - orang yang tergabung dalam pemerintahan adalah orang - orang berpendidikan. Ini menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan karena dunia pendidikan memberi wawasan lebih luas bagi seseorang yang menjalaninya. Dengan pendidikan yang diterimanya memungkinkan seseorang mampu merumuskan

masalah, menganalisa dan memecahkannya. Dalam kaitannya dengan kedudukannya sebagai pemerintah, faktor pendidikan membantu mereka dalam menyusun jenjang prioritas hingga menjadi suatu kebijaksanaan.

Orang - orang di balik kaisar yang berpengaruh dalam pemerintahan sebagian besar adalah samurai menengah yang pada masa Tokugawa memegang peranan dalam urusan administratif. Pengalaman - pengalaman yang diperolehnya membuat mereka terbiasa dalam mengorganisasi suatu kegiatan. Dalam kegiatan reformasi politik, ekonomi, sosial-budaya dan militer, mereka selalu menempatkan diri sebagai organisator. Ito Hirobumi berperan besar dalam proses perumusan konstitusi Jepang. Okuma dan Itagaki berperan besar dalam pembentukan partai politik sehingga pemerintah Jepang dapat menggunakannya sebagai katalisator feedback dari apa yang dilakukannya.

Orang - orang yang tergabung dalam pemerintahan sebagai aktor kebijaksanaan masa Meiji ini juga tidak segan - segan terlibat langsung dalam urusan praktis yang menuntut diri untuk rela berkorban demi mencapai tujuan negara. Mereka tidak segan - segan untuk meninggalkan jabatannya dalam pemerintahan untuk aktif secara langsung dalam kegiatan - kegiatan yang diprogramkan pemerintah seperti Godai Tomoatsu dalam kegiatan ekonominya dan Itagaki yang aktif dalam mempengaruhi praktek reformasi politik pemerintah dengan jalan pendirian organisasi politik. Tidak hanya itu, pemerintah yang sebagian besar

adalah samurai mampu menjadi pelopor bersatunya negara dengan jalan reformasi sosialnya yang sebenarnya lebih banyak merugikan kelasnya. Dari kenyataan ini dapat disimpulkan bahwa para aktor ini mampu menjadi dinamisator. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang sulit karena butuh sportifitas, keberanian, pengabdian yang tinggi.

Ditinjau dari segi usia, rata-rata para aktor ini merupakan orang yang berusia 30-an. Usia ini memberikan mereka kesempatan lebih lama untuk berkuasa. Dalam 25 tahun setelah Restorasi Meiji, para aktor ini berpeluang lebih besar untuk menerapkan kebijaksanaan secara berkesinambungan. Penerapan kebijaksanaan yang berkesinambungan dengan kesetiaan pada tujuan membuat jalan ke arah keberhasilan dapat dengan mudah dicapai.

Suatu pemerintahan dapat dikatakan berhasil apabila tujuan yang ditetapkan dapat dicapai dengan pelaksanaan kebijaksanaannya. Gambaran ini pun berlaku bagi pemerintah Meiji. Selama 25 tahun ke depan setelah restorasi mereka melakukan segala upaya agar dapat dianggap sama dengan bangsa Barat. Sasaran menuju kesamaan derajat ini adalah ratifikasi perjanjian tidak imbang yang pernah ditandatangani oleh shogun. Terlepas dari sikap otoriter dan diktaktor, mereka dengan bebas bertanggung jawab mampu menunjukkan diri tidak hanya sebagai organisator belaka tapi juga sebagai katalisator dinamisator berkualitas. Keberhasilannya dapat dibuktikan dengan sikap sedia

Inggris untuk meratifikasi perjanjian tahun 1894.



DAFTAR ISTILAH

Bakufu : bentuk pemerintahan shogunat. Bakufu merupakan markas besar tentara yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan. Pemerintahan ini bersifat diktatorial dan menganut politik isolasi.

Daimyoo : nama besar. Bangsawan Jepang jaman feodal yang menguasai wilayah yang luas. wilayahnya disebut han. Mereka di bawah pengawasan bakufu, tetapi berdaulat dan berhak memungut pajak, menjalankan pengadilan dan mempunyai hak-hak sipil serta militer.

De facto: menurut kenyataan yang sesungguhnya.

Demonstration effect : keinginan untuk meniru konsumsi barang mewah, sehingga pendapatan yang rendah digunakan seluruhnya untuk mengkonsumsi barang.

Feodalisme : dari bahasa latin yakni feodum artinya tanah yang dipinjamkan. Semua tanah dianggapnya sebagai milik raja. Raja-raja memiliki kekuasaan tidak terbatas. Mereka meminjamkan tanah-tanahnya kepada pembesar-pembesar daerah yang seakan-akan menjadi raja kecil dengan kekuasaan penuh.

Gantang : takaran yang biasanya untuk menakar beras yang beratnya kira - kira 3 kg.

Gemeinschaftlich : tipe ideal masyarakat atau kelompok yang ditandai adanya hubungan primer, ikatan batin dan tekanan pada tradisi (paguyuban :

organisasi yang didirikan untuk membina persatuan, kerukunan diantara para anggota yang sepaham.

Han : daerah yang dikuasai daimyoo. Terbentuknya han pada abad XII dan diatur oleh Yoritomo. Pada masa Tokugawa, Ieyasu membentuk sejumlah han menjadi sekitar 300 han. Han-han ini dibagi menjadi tiga kelas, menurut besarnya pajak:

- dai han : lebih dari 400.000 koku
- chuu-han : dari 100.000 - 400.000 koku
- shoo-han : di bawah 100.000 koku

Ratifikasi : perjanjian antarnegara.

Samurai : berasal dari kata kerja samurai yang berarti menjaga, seseorang yang menjaga; diterapkan terutama pada prajurit yang menjaga istana kerajaan.

Shogun : Jenderal besar. Pertama kali gelar ini diberikan pada Minamoto no Yoritomo sebagai so-shugo (gubernur jenderal militer) yang membentuk pemerintahan bakufu. Pada masa Tokugawa, jabatan ini menjadi turun temurun. Shogun memperoleh hampir semua kekuasaan pemerintahan nyata.

Tokugawa : Wangsa ningrat Jepang yang para keturunannya dari tahun 1603 - 1868 memerintah Jepang secara de facto dalam kedudukannya sebagai shogun.

DAFTAR PUSTAKA

- Bellah, Robert N.
1992 Religi Tokugawa. Terjemahan. Jakarta : Gramedia dan Karti Sarana.
- Budiardjo, Miriam.
1989 Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : Gramedia.
- Clyde, Paul H.
1962 The Far East. A History of The Impact of The West on Eastern Asia. New Jersey : Pretice Hall.
- Dasuki.
1962 Sedjarah Diepang, Jilid II. Bandung : Balai Pendidikan Guru.
- Hall, John W.
1983 Japan from Pre-history to Modern Times. Tokyo : Charles E. Tuttle.
- Hane, Mikiso.
1991 Premodern Japan. Colorado : Westview Press.
- Ishii, Ryoosuke.
1989 Sejarah Institusi Politik Jepang. Terjemahan. Jakarta : Gramedia.
- Kartodirdjo, Sartono.
1992 Pendekatan Ilmu Sosial dan Metodologi Sejarah. Jakarta : Gramedia.
- Kunio, Yoshihara.
1983 Perkembangan Ekonomi Jepang. Jakarta : Gramedia.
- Michael, Franz H. dan Taylor, George E.
1956 The Far East in The Modern World. USA : Henry Holt & Company, Inc.
- Nawawi, Hadari.
1990 Metode Penelitian Bidang Sosial. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Nio Joe Lan.
1962 Jepang Sepanjang Masa. Jakarta : Gramedia. Michigan : Overback Company.
- Pyle, Kenneth B.
1988 Generasi Baru Zaman Meiji. Jakarta : Gramedia.
- Reischauer, Edwin O.
1982 Manusia Jepang. Terjemahan. Jakarta : Sinar Harapan.

- Sadler, AL.
1946 A Short History of Japan. Sydney : Angus and Robertson, LTD.
- Salim, Peter dan Salim Yenni.
1991 Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta : Modern English Press.
- Sanson, G.B.
1950 The Western World and Japan. London : The Greaser.
- Sastrawiria, Tatang dan Wirasutisna, H.
1955 Ensiklopedi Politik. Jakarta : Perpustakaan Perguruan KPPK.
- Shojo, Fujita.
1981 Semangat Restorasi Meiji dalam Kekuatan yang Membisu. Kepribadian dan Peranan Jepang. Mochtar Lubis, prakata. Jakarta : Sinar Harapan dan Yayasan Obor Indonesia.
- Soekanto, Soerjono.
1982 Sosiologi Suatu Pengantar. Jakarta : CV. Rajawali.
- Suradjaja, I Ketut.
1984 Pergerakan Demokrasi Jepang. Jakarta : Karya Unipress.
- Suryohadiprojo, Sayidiman.
1987 Belajar dari Jepang : Manusia dan Masyarakat Jepang dalam Perjuangan Hidup. Jakarta : UI-Press.
- Sutrisno, Muji.
1996 Kuasa? (Kekuasaan). KOMPAS 5 Februari 1996 .
- Takeshi, Toyoda.
1969 A History of Pre-Meiji Commercial Japan. Tokyo : Kokusai Bunka Shinkokai.
- Wahab, Silichin A.
1990 Analisis Kebijakan Negara. Jakarta : Rineka Cipta.
- Weber, Max.
1987 Tipe - tipe Otoritas dalam Ilmu Administrasi Negara. H.G. Surie, ed. Terjemahan. Jakarta : Gramedia.
- Yukichi, Fukuzawa.
1985 Jepang di antara Feodalisme dan Modernisme. Jakarta : Pantja Sumpah.

